

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG KEBEBASAN WARTAWAN
MENURUT UNDANG-UNDANG 40 TAHUN 1999**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
dalam Ilmu Syari'ah (Jinayah Siyasah)

Oleh

AJI PURWADI
NPM. 1221020055

Jurusan Jinayah Siyasah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H/2018 M**

ABSTRAK

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG KEBEBASAN WARTAWAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999

Oleh : AJI PURWADI

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu memerlukan informasi dari orang lain secara langsung atau dari media massa serta membutuhkan akan barang maupun jasa guna menopang kehidupannya, yang biasanya diperoleh dari wartawan atau pers. Akan tetapi setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak semata-mata membuat pers merasa bebas dalam membuat berita maupun informasi kepada masyarakat.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : Bagaimana kebebasan wartawan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang kebebasan wartawan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebebasan wartawan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang kebebasan wartawan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Sedangkan kegunaan, *Pertama*, untuk menambah bahan referensi, bahan literatur atau pustaka, khususnya dalam memahami tentang kebebasan berbicara menurut Undang-undang, *Kedua*, memberikan wawasan kepada penulis dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi yang merupakan mata kuliah pokok dan diperdalam lebih lanjut lagi melalui studi-studi yang serupa dengan disiplin ilmu tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers terdapat rambu-rambu hukum pada landasan Idil terdapat pada Pancasila sila keempat, Landasan Konstitusional UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 28 dan Pasal 28E Ayat (3) serta Landasan Operasional pada Tap MPR No. XVII/MPR/1998, UU No. 9 Tahun 1998 dan UU No. 39 Tahun 1999. Masih banyak rambu-rambu hukum dan pengelompokan sosial yang membatasi kebebasan berpendapat, dan perspektif hukum Islam tentang kebebasan berbicara harus mengedepankan kejujuran dalam berbicara karena akan membawa kepada kebajikan maka mensucikan akhlak manusia, berkata baik, memberi nasehat, mengajarkan ilmu yang bermanfaat merupakan perwujudan dari kejujuran.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi
Saudara :

Nama : AJI PURWADI

NPM : 1221020055

Jurusan : Jinayah Siyasa

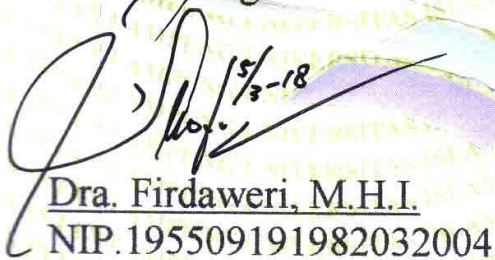
Fakultas : Syari'ah

Judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG
KEBEBASAN WARTAWAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999

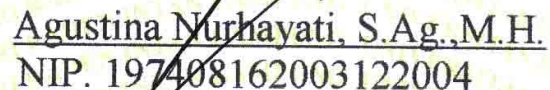
MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

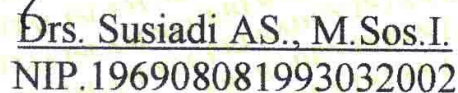
Pembimbing I


Dra. Firdaweri, M.H.I.
NIP.195509191982032004

Pembimbing II


Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.
NIP. 197408162003122004

Ketua Jurusan


Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.
NIP.196908081993032002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul : “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG KEBEBASAN WARTAWAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999. disusun oleh : AJI PURWADI, NPM : 1221020055, Jurusan : Jinayah Siyasa, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal : Rabu, 14-02-2018.

Tim Dewan Penguji :

Ketua : Frengki, M. Si.

(.....)

Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I.

(.....)

Penguji I (Utama) : Eko Hidayat, S.Sos., M.H

(.....)

Penguji II (Pembantu): Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Alamsyah S.Ag., M. Ag
NIP. 197009011997031002**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ

فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

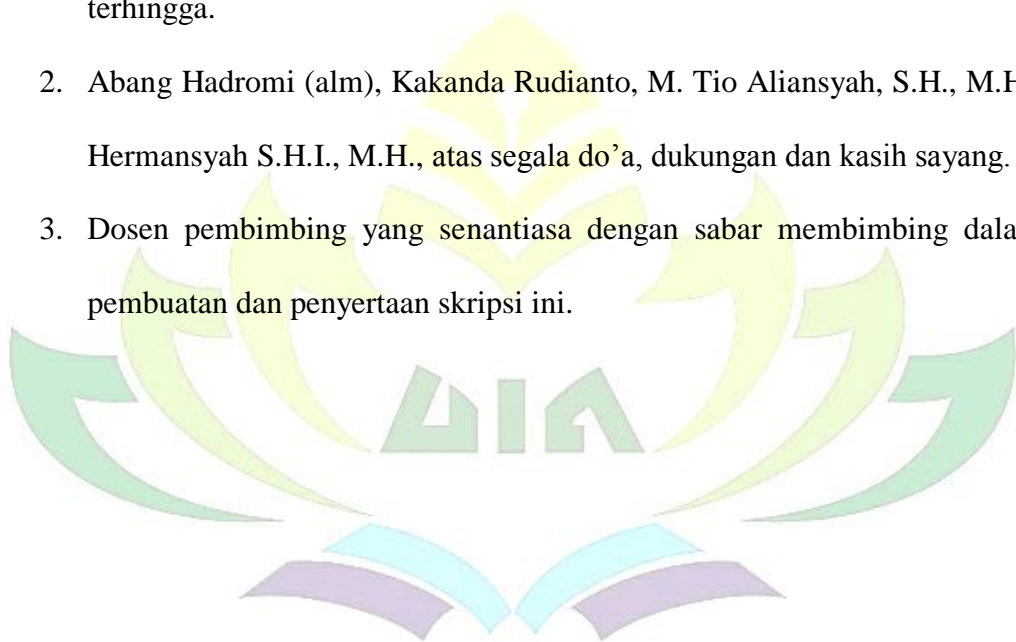
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. [Al-Qur'an surat Al-Hujarat Ayat 6].¹

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Ayah tercinta, Muhtawi dan Ibu tercinta, Dahlia, atas segala pengorbanan, do'a, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Abang Hadromi (alm), Kakanda Rudianto, M. Tio Aliansyah, S.H., M.H., Hermansyah S.H.I., M.H., atas segala do'a, dukungan dan kasih sayang.
3. Dosen pembimbing yang senantiasa dengan sabar membimbing dalam pembuatan dan penyertaan skripsi ini.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Aji Purwadi, putra kedua pasangan bapak Muhtawi dan Ibu Dahlia. Lahir di Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau pada tanggal 20 Maret 1992. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu Kakak laki-laki bernama Adromi (alm).

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada :

1. SD Negeri 01 Kubu Batu pada tahun 1999 dan selesai pada tahun 2004.
2. Madrasah Tsanawiyah pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2007.
3. SMK PGRI Negeri 01 Kedondong pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi pada Fakultas Syari'ah pada tahun 2012

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam Tentang Kebebasan Wartawan menurut Undang-Undang” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Dra. Firdaweri, M.H.I., selaku Pembimbing I dan Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak / Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah.

4. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola Perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
5. Saudara-saudara selalu mendukung, membantu, dan menemani dalam keadaan apapun, Alfadila, Ibeng, Jack, Tobek, Gusti, Joni, Irvan Golok, Frori, Dicki, Husni LCW, Bokir, Dirga Santosa, Rofikul Umam, dan Kanda Yunda, Adinda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah UIN Raden Intan Lampung,
6. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Jinayah Siyasah B 2012.
7. Almamater tercinta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi, masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman dan ilmu hukum di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 03 Agustus 2017

Penulis,

Aji Purwadi



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	11

BAB II KEBEBASAN WARTAWAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kebebasan Wartawan Dalam Islam	15
B. Sejarah Hukum Kebebasan Wartawan Dalam Islam	16
C. Pandangan Hukum Islam dalam Kebebasan Wartawan	19
D. Etika Wartawan dalam Hukum Islam	27

BAB III KEBEBASAN WARTAWAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

A. Historitas Hukum Kebebasan Wartawan Menurut Undang-undang..	32
B. Dasar Terbentuknya Hukum Kebebasan Wartawan dalam Undang-undang.....	42
C. Perlindungan Hukum Tentang Kebebasan Wartawan dalam Undang-Undang	51

BAB IV ANALISIS KEBEBASAN WARTAWAN MENURUT UU PERS DALAM HUKUM ISLAM

A. Kebebasan Wartawan Di Indonesia Menurut UU No 40 Tahun 1999..	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebebasan Wartawan Menurut UU No 40 Tahun 1999	72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul ini merupakan salah satu bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul adalah sebagai pemberi arah serta dapat memberikan gambaran dari semua isi yang terkandung di dalamnya. Demikian juga halnya dengan skripsi ini berjudul :

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG KEBEBASAN WARTAWAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999

Untuk lebih memahami pengertian dan maksud dari judul tersebut di atas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa pengertian untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan penyimpangan pemahaman judul skripsi ini, antara lain adalah :

1. Perspektif Hukum Islam

Perspektif adalah suatu “cara atau sudut pandang tentang suatu peristiwa.”² Hukum islam adalah syari’at atau hukum-hukum Allah yang ada pada agama Islam itu sendiri untuk mengatur sekaligus menjadi pedoman, baik perintah, larangan, ataupun anjuran untuk melakukan sesuatu pada umatnya dengan berpedoman pada al-Qur’an, Hadits, dan pendapat para ahli Fuqaha’. Ahli fiqh mendefinisikan hukum Islam adalah fiqh, yaitu :

² G. Setya Nugraha dan R. Maulina F, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karina), h.475

الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْوُجُوبِ وَالْحُظْرِ
وَالنَّذْبِ وَالْكَرَاهَةِ وَالْإِبَاحَةِ وَهِيَ مُتَلَقَّاءُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا نَصَبَهُ
الشَّارِعُ لِمَعْرِفَتِهَا مِنَ الْأَدْلَةِ فَإِذَا اسْتَحْرَجْتَ لِأَحْكَامٍ مِنْ تِلْكَ الْأَدْلَةِ قِيلَ
لَهَا فِقْهُ

“Fiqh itu ialah, ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala pekerjaan mukallaf, baik yang wajib, yang haram, yang sunnah, yang makruh dan yang mubah, yang diambil atau diistimbatkan dari Al-Kitab dan As-Sunnah dan dari dalil-dalil yang telah ditekankan Syara’. Untuk mengetahui hukum-hukum dari dalil-dalil tersebut, apabila dikeluarkan hukum-hukum dengan jalan ijtihad dari dalil-dalilnya, maka yang dikeluarkan itu dinamai fiqh”.³

Jadi yang dimaksud dengan perspektif hukum Islam dalam penelitian ini adalah sudut pandang atau ketentuan hukum Islam tentang menyikapi serta menanggapi suatu peristiwa yang didasarkan pada Al-qur’an dan Hadist. Kebebasan Berbicara

2. Kebebasan Wartawan

Kebebasan wartawan adalah karyawan yang melakukan pekerjaan atau kegiatan usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan sebagainya untuk perusahaan pers, radio, televisi dan on line. Jadi semua manusia yang bekerja dalam bidang redaksi adalah wartawan. Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers dikatakan, wartawan adalah

³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 27.

orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik (Pasal 1 ayat 4).⁴

Jadi wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik yang pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan sebagainya dengan jujur dan kredibilitas secara jujur dan professional.

3. Undang-Undang (UU) Pers No.40 Tahun 1999

Undang-undang Pers (secara resmi bernama Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. Undang-undang Pers disahkan di Jakarta pada 23 September 1999 oleh Presiden Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie dan Sekretaris Negara Muladi.⁵

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3,

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

⁴ A.M. Hoeta Soehoet, *Dasar-Dasar Jurnalistik*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2010), h.6

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5,

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Tolak.

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

Dari tinjauan perspektif hukum Islam, adanya kebebasan berbicara menurut UU Pers dalam hukum Islam yang dilakukan melalui ketentuan-ketentuan yang sesuai ajaran dan perintah agama Islam.

2. Secara Subjektif

Masih banyaknya yang belum bebas berbicara dalam menentukan hak dan kewajibannya.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan rasa ingin tahu yang besar. Rasa ingin tahu tersebut membuat manusia berusaha untuk

mencari dan terus mencari berbagai informasi yang ada di sekitarnya. Rasa ingin tahu ini juga akan semakin besar jika ia melihat benda atau mendengar sebuah berita yang menurutnya masih asing, maka ia akan mencari tahu lebih lanjut tentang berita tersebut, hingga mereka mencari informasi yang mereka butuhkan.⁶

Informasi yang didapat oleh manusia selalu berkembang di setiap zaman. Pada awalnya, informasi yang didapatkan oleh manusia berasal dari informasi berantai atau berita “dari mulut ke mulut”. Bahkan cerita yang ada pada zaman dahulu hanya ditularkan melalui informasi lisan tersebut. Kemudian, sejalandengan perkembangan manusia yang menemukan berbagai perangkat yang mendukung penyebaran dan perekaman informasi, maka akan berubah pula cara penuturannya. Misalnya, ditemukan zaman batu yang memungkinkan informasi bisa diwariskan melalui tulisan atau lukisan-lukisan di dinding gua. Berkembang kemudian ditemukan kertas. Jadi, informasi yang diberikan sudah berkembang secara lebih baik. Sampai kemudian ditemukan mesin cetak, media elektronik yang sekarang kita kenal.⁷

Dari pemaparan di atas, menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu memerlukan informasi dari orang lain secara langsung atau dari media massa serta membutuhkan akan barang maupun jasa guna menopang kehidupannya. Terlebih dari itu manusia pasti berinteraksi dengan orang lain untuk membentuk sosial komunal guna membangun masyarakat yang dinamis. Sudah barang tentu dalam bermasyarakat terjadi

⁶ Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22.

⁷ *Ibid*, h 3

interaksi sosial yang menimbulkan berbagai pendapat atas terjadinya suatu permasalahan, dan perbedaan pendapat adalah hal yang bersifat kodrati.

Kebebasan untuk berpendapat diatur dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Hal ini juga didukung oleh salah satu ciri negara hukum yang berbunyi “berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM”.⁸ Sehingga mengeluarkan pendapat adalah sebuah hak yang harus diperjuangkan sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945. Perjuangan untuk mengeluarkan pendapat juga pernah dilakukan oleh pers Indonesia sebelum orde baru runtuh.

Masa orde baru bisa dibilang masa yang suram bagi pers Indonesia. Pada masa itu pers Indonesia rawan pembredelan. Karena “suara pers” selalu membuat telinga pemerintah yang berkuasa memerah dengan berita-berita yang menyudutkan ataupun mengungkap borok penguasa. Ini pula yang menimpa beberapa media massa di Indonesia: dibredel, dicabut surat izin usaha penerbitannya (SIUPP) oleh pihak yang berwenang hampir di setiap orde pemerintahan, pembredelan menjadi momok yang menakutkan bagi dunia jurnalistik. Kita tentu masih ingat kasus tiga media massa; *Detik*, *Tempo*, dan *Editor* yang dibredel tahun 1994 atau kasus *Indonesia Raya* tahun 1974.⁹

⁸ Id.m.wikipedia.org/wiki/Negara_Hukum diakses pada tanggal 26 Mei 2017

⁹ Basiliun Triharyanto, *Pers Perlawanan*, (Yogyakarta: Lkis, 2009), h. 5

Pembredelan yang menakutkan ini membuat pers merasa terancam dan tidak berani mengungkap keburukan yang dilakukan oleh para penguasa. Mereka lebih memilih main aman dengan tidak menulis berita yang bisa membuat penguasa marah. Soeharto yang kala itu menjabat sebagai presiden bisa dibilang cerdas karena berhasil merumuskan Pers Pancasila yang secara resmi dirumuskan pertama kali dalam Sidang Pleno Dewan Pers ke-25 di Solo pada pertengahan 1980-an.¹⁰ Hakikat Pers Pancasila adalah pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai penyebar informasi yang benar dan obyektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif. Melalui hakekat dan fungsi itu, Pers Pancasila mengembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dan bertanggung jawab.

Istilah Pers Pancasila sebenarnya merupakan cerminan keinginan politik yang kuat dan ideologisasi korporatis saat itu yang menghendaki pers sebagai alat pemerintah. Sehingga disini pers tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai penyebar informasi yang benar dan obyektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif. Bahkan pada saat ini pers hanya berfungsi sebagai corong pemerintah.

Berbagai pembatasan yang dibuat pada masa Soeharto membuat wartawan menjadi tidak bebas menulis. Karena pada era ini muncul “budaya telepon”, yaitu semacam peringatan melalui telepon yang dilakukan oleh aparat pemerintah kepada kantor redaksi dan media cetak untuk tidak berbuat

¹⁰ Sisil-masterpiece.blogspot.com diakses pada tanggal 27 Mei 2017

yang macam-macam, sehingga pada waktu itu pers seolah telah kehilangan fungsinya dan hanya menjadi sebuah industri. Keuntungan mereka meningkat karena tidak memberitakan keburukan penguasa, namun sayangnya kondisi ini tidak berbanding lurus dengan kebebasan mereka untuk menulis berita.

Seiring berjalannya waktu akhirnya rezim Soeharto pun runtuh dengan munculnya krisis ekonomi dan keberanian pers untuk mengungkap borok pemerintah yang tak bisa dibendung lagi karena pers juga tak mau bungkam terus-menerus. Menjelang akhir pemerintahannya sebagai presiden, Soeharto masih berusaha untuk mengintimidasi pers dengan tuduhan pers tidak proposional dan melakukan disinformasi karena pers selalu menampilkan aksi demo mahasiswa tuntutan reformasi di halaman pertama. Tindakan pers yang demikian membuat Soeharto marah dan jika hal itu terjadi biasanya pers akan ciut nyalinya, namun situasi yang terjadi justru sebaliknya.

Perjuangan Pers Indonesia akhirnya berbuah manis. Tepatnya tahun 1999 dengan ditutupnya Departemen Penerangan dan disahkannya UU Pers No 40/1999 tentang Pers. Undang-undang ini didasarkan pada pasal 19 International Convention of Human Right yang dalam bahasa Indonesianya berarti “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apa pun juga dengan tidak memandang batas-batas”.¹¹

¹¹ Sirikit Syah, *Rambu Rambu Jurnalistik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 6

Akan tetapi setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak semata-mata membuat pers merasa bebas. Berbagai ancaman mulai bermunculan, salah satunya pada tahun 2002, yang mana waktu itu ancaman datang dari golongan elit politik untuk melemahkan pers. Menurut catatan Dewan Pers, tanggal 21 Maret 2002 dalam acara dengar pendapat antara komisi I DPR dengan masyarakat pers, sejumlah anggota DPR mengecam kebebasan pers dan mengusulkan perlunya revisi UU No 40 Tahun 1999 dengan memasukkan pasal-pasal pidana KUHP.¹²

Dalam kerangka fiqh Islam, kebebasan mengemukakan pendapat atau berbicara biasa disebut *la hayyirruh halitsi nagned-y'ar*, *araces gnay tapadnepreb nasabebek itrareb sigolomiteyang* juga berarti kebebasan berbicara. Penggunaan istilah *Hurriyah Al-Ra'y* menunjukkan bahwa para ulama dan sarjana muslim telah *gnitnep tama gnay nakududek naktapmenem naumliek nad narikimep isidart malad Islam*. Dengan demikian *Hurriyyah Al-Ra'y* mensyaratkan adanya pendapat dan pemikiran *gnatam gnay, maladnem huggnus nad-usngguh*. Setiap orang boleh mengemukakan *huajes tapadnep natajuhgnep gnuadnagnem gnay mukuh raggnalem kadit*, *atres hantif* didasarkan pada argumen yang logis, faktual dan bertanggung jawab.

¹² Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)h. 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa:59)

Secara fitrah manusia sudah dibekali dengan daya intelektualitas dan kebebasan beragama, kebebasan untuk berpikir, kebebasan berbicara, kebebasan menuntut ilmu serta kebebasan berprinsip at-Tasyawur/ as-Syura (musyawarah).

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebebasan wartawan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang kebebasan wartawan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kebebasan wartawan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

2. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam tentang kebebasan wartawan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.
2. Dapat memberikan informasi tentang kebebasan berbicara, serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, hususnya yang berkaitan dengan permasalahan kebebasan berbicara.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana-1 pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka (*library research*). Yang dimaksud dengan metode studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,¹³

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian berbentuk deskriptif bertujuan menggambarkan realitas obyek yang diteliti, dalam rangka menemukan diantar dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 81.

mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.¹⁴

2. Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier, yaitu:

- a. Sumber hukum primer dalam hal ini adalah UUD 1945, UUNo 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kode Etik Jurnalistik serta peraturan-peraturan yang terkait dengan kebebasan pers.
- b. Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak dan elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan.¹⁵
- c. Bahan hukum disini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen yang terkait

3. Metode Pengumpulan Data

Metode penulisan yang digunakan adalah metode studi pustaka (*library research*). Yang dimaksud dengan metode studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), h. 96.

¹⁵ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), h. 392.

sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,¹⁶ yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, bukubuku pustaka, majalah, artikel surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang berkaitan dengan kebebasan pers yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data telah terkumpul, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Editing, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
- a. Coding, yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh baik penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukan golongan atau kelompok, atau klasifikasi yang menunjukan golongan atau kelompok, atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.¹⁷
- b. Sistemating atau sistematika data, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah.¹⁸

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis,

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 81.

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 126.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, h. 126.

analisis dengan logika, dengan induksi, analogi, komperasi dan sejenisnya. Metode berfikir yang digunakan adalah metode induktif, yaitu dari data menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang).¹⁹ Dari analisi tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.



¹⁹ Faizal, *Penelitian Kualitatif : dasar-dasar dan aplikasi*, (Malang: 1990), h. 39.

BAB II

KEBEBASAN WARTAWAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kebebasan Wartawan Dalam Islam

Kebebasan Wartawan adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, pencetakan dan penerbitan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.²⁰

Kebebasan Wartawan merupakan perwujudan dari kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan untuk menceritakan suatu peristiwa. Atau, kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan pikiran, dengan cara menyampaikannya suatu informasi kepada massa, dalam semua kondisi.²¹ Kode etik jurnalistik mendefinisikan kebebasan pers sebagai kebebasan seseorang untuk menukilkan apa yang dia mau dan menyebarkan melalui Koran, buku, atau media cetak lain, untuk dikonsumsi secara umum.

Kenyataannya, ada semacam kesepakatan dari para perumus undang-undang bahwa inti dari kebebasan mengeluarkan pendapat dan mengungkapkan suatu peristiwa adalah diperbolehkannya seseorang menampilkan pendapatnya secara terang-terangan serta mengungkapkan

²⁰ Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 3.

²¹ Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 10.

pemikirannya tanpa adanya ikatan. Bahwa ikatan apapun yang ada adalah bebtuk pengecualian, bukan merupakan hal yang inti.

Kebebasan Wartawan dan berekpresi muncul kembali di Indonesia dari perjalanan panjang, setelah menghilang selama 40 tahun. Dalam satu dasawarsa terakhir, selama awal masa Reformasi pada 1998-2008, kita berupaya membangun kembali kebebasan ini, yang pada suatu masa, setengah abad yang lampau, pernah berkembang di negeri ini pada masa 1950-an.²²

Kebebasan Wartawan adalah harapan kita untuk melanjutkan idealisme Wartawan bebas yang memiliki tujuan pendidikan. Undang-undang pers yang berlaku sekarang menjamin kebebasan atau kemerdekaan Wartawan, menghapus sistem lisensi berupa perizinan untu membatasi kebabasab Wartawan, dan meniadakan kekuasaan pemerintah untuk melarang terbitan Wartawan. Wartawan memiliki hak tolak, selain kebebasan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan serta inforamasi.²³

B. Sejarah Hukum Kebebasan Wartawan Dalam Islam

Catatan sejarah Islam menunjukkan, komunikasi Nabi Muhammad saw dalam menyampaikan pesan atau informasi mengenai nilai-nilai, dan ajaran Islam, frekuensinya cukup tinggi dan variatif, guna menata kehidupan manusia yang seimbang. Melalui proses komunikasi, Nabi Muhammad telah

²² Attakusumah, *Tuntunan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi*, (Jakarta: Spasi & VHR Book, 2009) h. 304.

²³ *Ibid*

mengekspresikan ajaran Islam, memberi pengertian, mempengaruhi interpretasi dan merubah perilaku manusia. Pada proses komunikasi yang membawa efek kebersamaan ternyata dapat menciptakan saling kebergantungan antara satu dengan yang lainnya dengan ukhuwah Islamiyah maupun dalam kerangka jihad.

Fenomena menarik lainnya dari isyarat komunikasi Islam adalah, komunikasi berlangsung sebagai tindakan internasional dalam menjawab berbagai persoalan, memunculkan gagasan atau ide-ide yang dimunculkan dari proses komunikasi itu sendiri. Kajian Komunikasi Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip Fundamental begitu juga halnya dengan jurnalistik Islam, yang menjadi kerangka dasar bangunan Islam dalam tatanan kehidupan yang seimbang antara duniawi dan ukhrawi. Bangunan Islam dibentuk oleh etika religious Islam. Oleh karena itu jurnalistik Islam harus ditopang oleh pilar bangunan itu dalam bergerak menuju masa depan yang lebih baik.

1. Prinsip Tauhid. Dalam Islam pandangan yang paling utama dan paling mendasar mengenai manusia dan jagat raya adalah tauhid. Dari pilar satu memunculkan tuntunan akan pengabdian manusia kepada Tuhan sang Pencipta. Dengan menggunakan konsep ketuhanan, maka jurnalistik Islam dalam merebut tempat bagi manusia, untuk otoritas dan lembaga harus dalam kerangka pengabdian kepada Allah. Dengan demikian konsep tauhid jika dilaksanakan akan memberikan prinsip dalam menentukan batas legitimasi atau suatu sistem dalam jurnalistik Islam.

2. Prinsip Tanggung Jawab. Dalam persepektif agama, maka Islam dilihat sebagai agama yang bersifat mission, dimana syiar-syiar pesannya harus terus berlangsung dalam kehidupan manusia. Dengan prinsip tanggung jawab, maka jurnalistik Islam mempunyai visi dan misi serta komitmen yang tinggi dalam menyadari jurnalistik Islam adalah amanah Sang Khalik yang akan dimintai pertanggung jawabannya. Oleh karena itu pada koridor ini prinsip jurnalistik Islam adalah dalam doktrin “amar ma’ruf nahi munkar” (QS. 3:10).

3. Prinsip Ummah/hablum minannas

Jurnalistik Islam tidak terlepas dari misi ajaran agama Islam, dimana misi itupun terdapat dalam al Qur’an dan hadist. Sedangkan pada proses komunikasinya, kedudukan al Qur’an dan hadist adalah sebagai sumber/rujukan dari perilaku komunikasi dan pesan-pesan yang disampaikan. Dilihat dari persepektif ini maka jurnalistik Islam berada pada siklus al-Qur’an dan hadist yang inipun sekaligus menjadi ciri khasnya. Dalam proses komunikasi antar manusia al Qur’an telah memberikan ketentuan-ketentuan yang disimpulkan menjadi enam prinsip yaitu: *Qaulan sadidan* (QS. 4 ; 9-33:70), *qaulan balighan* (QS. 4:630), *qaulan maysuran* (QS. 17:33), *qaulan layyinan* (QS. 20:44), *qaulan kariman* (QS. 17:23), dan *qaulan ma’rufan* (QS. 4:5). Keenam prinsip ini merupakan kata kunci yang mengajarkan manusia bagaimana seharusnya ia berkomunikasi pada saat komunikasi itu berlangsung.

C. Pandangan Hukum Islam dalam Kebebasan Wartawan

Ada pepatah sederhana mengatakan “membaca adalah kunci ilmu, sedangkan gudangnya ilmu adalah buku “ ungkapan itu sepintas terlihat sederhana akan tetapi jika di simak, memiliki makna yang dalam. Sejalan dengan firman Allah SWT. surat al-‘Alaq ayat pertama “*iqra*” mengandung makna baca tulis, dari wahyu yang pertama tergambar perintah Allah SWT. Kepada manusia untuk mengggoreskan pena supaya dapat dibaca orang lain. Goresan-goresan pena itu dari dahulu sampai saat ini bahkan sampai akhir zaman nanti dibutuhkan dan dinantikan kebanyakan manusia. Karenanya sejak awal Islam telah mengajak manusia untuk mengenalkan baca tulis, kemudian berkembang di abad moderen ini dikenal dengan media cetak (surat kabar, buku, tabloid, dan lain-lain).

Jurnalistik Islam dapat dimaknai sebagai “suatu proses meliput, mengolah, dan menyebarluaskan berbagai peristiwa dengan muatan-muatan nilai Islam, khususnya yang menyangkut agama dan ummat Islam kepada khalayak, serta berbagai pandangan dengan persepektif ajaran Islam”. Dapat juga jurnalistik Islam dimaknai sebagai “proses pemberitaan atau pelaporan tentang berbagai hal yang sarat dengan muatan dan sosialisasi nilai-nilai Islam”. Jurnalistik Islam bisa dikatakan sebagai *crousade journalism*, yaitu jurnalistik yang memperjuangkan nilai-nilai tertentu, yakni nila-nilai Islam. Jurnalistik Islam mengemban misi ‘*amar ma’ruf nahi munkar*’ (Q.S. Ali Imran ayat: 104).

Dalam hal ini seorang jurnalis atau wartawan muslim dituntut untuk selalu menjadikan Al-Qur’an dan hadis sebagai landasan dalam memberikan

informasi kepada khalayak. Hal ini dimaksudkan agar berita yang diperoleh oleh khalayak luas atau masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara langsung oleh sipembuat berita yaitu wartawan itu sendiri. Kelengkapan al-Quran dengan jurnalistik Islam yang membiaskan pengaruh sangat luas, eksis dalam hubungan keduanya yang seakan-akan saudara kembar atau pinang dibelah dua. Bahwa al-Quran kata-kata Tuhan sedangkan jurnalistik adalah “tulisan tangan manusia”.

Secara sederhana jurnalis Islam itu dapat difahami seorang da’I atau sekelompok umat manusia yang menyampaikan pesan-pesan Islam kepada Umat manusia. Menyampaikan informasi-informasi/pesan-pesan Islam melalui media semestinya melalui media Islam juga, tapi mampukah media Islam itu benar-benar mewujudkan secara nyata ruh keislaman itu dalam kehidupan media?

Dilihat kenyataan sekarang ini begitu dahsyatnya perkembangan media cetak dan media elektronik (komunikasi massa), tapi yang manakah media Islam? berapakah jurnalis Islam yang benar-benar menyampaikan dakwah Islam? Berapa persenkah isi berita tentang dunia Islam? Atau dari sekian banyak media berapa persenkah isi media terhadap pesan-pesan/informasi-informasi Islam?

Jurnalistik Islam sangat erat kaitannya dengan komunikasi Islam itu sendiri, komunikasi Islam adalah informasi yang diterima khalayak pada media informasi. Sedangkan jurnalistik Islam adalah seorang

jurnalis/wartawan atau dapat juga dikatakan da'i yang menyampaikan pesan-pesan keislaman kepada khalayak.

Komunikasi Islam merupakan bidang kajian baru yang menarik perhatian sebahagian akedemisi di berbagai perguruan tinggi. Seperti pada bulan Januari 1993, jurnal media, *Culture and Society* yang terbit di London, memberi liputan kepada komunikasi Islam. Pengakuan satu jurnal komunikasi yang terbit di Barat terhadap komunikasi Islam tersebut dapat dipandang sebagai suatu tantangan bagi kaum intelektual muslim terutama pakar komunikasi untuk mencari identitas sendiri sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya Islam.²⁴

Komunikasi Islam yang masih dalam taraf pengembangan, tentu saja masih menggunakan atau meminjam teori-teori komunikasi secara umum, yang kemudian dimodifikasi dengan komunikasi Islam. Melihat kenyataan umur keilmuan komunikasi Islam yang masih tergolong masih muda, maka wajar komunikasi Islam masih menggunakan teori komunikasi secara umum.

Melihat latar belakang munculnya komunikasi Islam yang masih baru, tentu memerlukan perjuangan yang masih panjang dan berat bagi jurnalis Islam. Oleh karena itu Quo vadis jurnalis Islam? dengan kenyataan bahwa kapitalis lebih dominan di dunia ini, mereka lebih memiliki kekuatan di segala bidang kehidupan. Ditambah lagi dengan keadaan umat Islam itu sendiri terlalu sibuk dengan pemahaman keislaman masing-masing, terlalu

²⁴ Dr. H. Syukur Kholil, MA. 2007, *Komunikasi Islam*, Bandung: Citapustaka Media, hlm. 6

sibuk dengan kebenaran partai-partai keislaman masing-masing, sehingga kurang memperhatikan tali persaudaran sesama kaum Muslimin.²⁵

Selain itu faktor yang sangat dominan membuat para jurnalistik pada media Islam kurang mampu mengimbangi media Barat tidak lain karena faktor ekonomi dan politik. Para pengamat pengaliran berita Internasional mengatakan bahwa sistem komunikasi massa dikuasai oleh agensi berita internasional dari negara-negara maju, terutama negara-negara Barat. Empat agensi berita internasional yang paling besar, yaitu *Associated (AP)*, *United Press International (UPI)* dari Amerika Serikat, *Agence France Presse (AFP)* dari Perancis, dan *Reuter* dari Inggris, tetap merupakan sumber utama berita internasional bagi negara-negara Dunia Ketiga.²⁶

Karenanya bagaimana dunia Islam/jurnalistik Islam mampu mengimbangi kekutan media Barat supaya Informasi yang mengalir kepada masyarakat seimbang, maka Galtung mengatakan bahwa pengaliran informasi di dunia cenderung tidak seimbang (*imbalance*). Publik Barat hanya sedikit mengetahui tentang Islam, kemudian informasi yang sedikit cenderung bersifat negatif. Akibatnya publik Barat hanya mengetahui Islam sebagai agama yang menyukai tindakan kekerasan, miskin, bodoh, kelaparan dan terkebelakang.²⁷

Dasar apa negara Barat membuat berita yang tidak adil terhadap dunia Islam?

²⁵ Al-Quran dan terjemah, surat al-Imaran ayat 104.

²⁶ Tatarian, R 1978, *News Flow in the Third World : An Overview*. Dalam Philip, C.H (Ed), *The Third World and Press Freedom*. New York: Praeger Publisher dalam Kholil, Syukur, 1999, *Liputan Agensi-Agensi Berita Internasional Tentang Dunia Islam Dalam Surat Kabar Indonesia*, Medan, hlm.1.

²⁷ Galtung (1992) dalam *Ibid* Syukur Kholil, hlm. 88.

Apakah dunia barat tidak memiliki etika jurnalistik? Apakah etika jurnalistik itu hanya berlaku bagi dunia Timur?

Begitulah media Barat, undang-undang negara Barat pasal 19 *Universal Declaration of Human Right* yang mengatakan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi atau idea melalui media massa tanpa ada hambatan. pernyataan ini menjadi dasar bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya untuk memperjuangkan *News Free Flow* (pengaliran berita-berita bebas).²⁸

Soal bicara dan berpendapat memang berkaitan dengan sejarah pertumbuhan pers, pers lahir dari sejarah perjuangan manusia tentang kebebasan berbicara setiap anggota masyarakat. Bahkan pada perjalanan selanjutnya, hingga saat ini, pers tetap dipandang sebagai kekuatan moral yang mampu menggerakkan semangat demokrasi.²⁹ Dalam hal ini perlu digaris bawahi, itulah perbedaan komunikasi Islam dengan komunikasi secara umum. Prinsip komunikasi Islam berbeda dengan prinsip komunikasi secara umum, prinsip komunikasi Islam berupa *free and Balance flow pf information* yang dipandang lebih adil dan manusiawi bila di lihat komunikasi secara umum hanya sebatas *free flow of information*.

Paling tidak dalam komunikasi Islam ada nilai-nilai etika yang menjadi pegangan jurnalis Islam, adalah sebagai berikut:

1. Jujur

²⁸ *Op-Cit.* Syukur Kholil. 1999. Hlm. 89.

²⁹ *Op-cit.* Asep Saeful Muhtadi. hlm. 14

Kejujuran dalam berkomunikasi, yakni menyampaikan pesannya secara benar dan berdasarkan fakta dan data tidak memutar balikkannya merupakan hal yang utama untuk diperhatikan bagi seorang muslim. Seorang penyampai berita yang tidak jujur (bohong) sangat begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam pragmentasi sejarah Rasulullah begitu juga dalam tradisi hadist Rasulullah. Istilah hadist *maudhu'* (bohong) dapat membawa kepada kesesatan, kebinasaan dan kecelakaan besar. Beberapa ayat al Qur'an yang menegaskan tentang kejujuran ini dengan sebutan *shidiq*, *amanah*. Dengan komitmen kejujuran dalam menyampaikan berita seperti di atas, maka seorang muslim dalam berkomunikasi menurut al Qur'an tidak boleh berdusta (QS:31:6)

1. Adil

Adil adalah tidak memihak. Dalam menjelaskan proses berkomunikasi al Qur'an telah membimbing kita agar berkomunikasi secara adil dan tidak memihak. Adil dan tidak memihak yang dimaksud disini adalah tidak mengabaikan status sosial seseorang atau kelompok ketika kita harus menyampaikan seluruh informasi. Bagaimana kita agar berkomunikasi atau menyampaikan informasi secara seimbang baik terhadap kaum kerabat, pejabat dan dengan fakir miskin sekalipun. Kata adil yang erat kaitannya dengan komunikasi atau penyampaian informasi terdapat pada (Q.S. 6: 152)

Seorang jurnalis yang adil, akan menempatkan dirinya untuk tidak menimbulkan keberpihakan. Karena kata adil juga berarti sama dan seimbang

dalam memberikan balasan, seperti qishas, diat dan berbagai pidana lainnya. Seorang jurnalis yang adil juga menyangkut keberanian untuk mengatakan yang benar dan yang salah terhadap siapapun.

1. Bertanggung jawab

Bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab merupakan sikap yang sangat penting untuk dipelihara dalam perilaku seorang muslim dalam segala aktifitasnya. Al Qur'an sangat banyak mengingatkan kita agar bertanggung jawab terhadap setiap pesan dan janji yang telah kita sampaikan. Rasa tanggung jawab secara tegas telah mengingatkan kepada kita ini bukan hanya dikarenakan pesan yang disampaikan tersebut menyangkut kepentingan seseorang atau kelompok, melainkan kesadaran yang tinggi terhadap Allah swt. Seorang jurnalis yang bertanggung jawab akan menganalisa setiap perkataan dengan hati-hati, memperhitungkan setiap akibat yang mungkin dan secara sadar menimbang dengan nilai-nilai Islam.

1. Benar-benar akurat

Informasi dan pesan yang akurat. Penyampaian informasi yang tidak jelas sumbernya dan valid datanya adalah sangat potensial untuk menimbulkan fitnah. Maka dengan itu al Qur'an secara tegas telah mengingatkan kepada kita agar sangat berhati-hati dan tidak terjebak kepada informasi bohong.

Itulah Islam agama yang indah dan sangat toleran terhadap semua agama dan semua golongan manusia, agama yang rahmatallil'amin. Tergantung kepada orang Islam sajalah yang harus menyadarkan diri, bagaimana dapat menyeimbangkan jurnalis Islam dengan jurnalis barat sebagai media dakwah Islamiyah. Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa dakwah adalah bentuk yang teristimewa dari komunikasi, maka media-media komunikasi dapat dipergunakan untuk berdakwah.

Walaupun komunikasi Islam terbilang baru, dan belum mampu menyeimbangkan informasi dengan dunia Barta, tetapi paling tidak di Indonesia pada era reformasi ini, pers berbasis agama bermunculan. Kebanyakan adalah pers Islam. Beberapa penerbitan Islam yang lahir di masa reformasi antara lain Sabili, Hidayah, Suara Islam, Hidayatullah, dan lain-lainnya yang berbasis agama. Itu menunjukkan jurnalis Islam cukup peduli terhadap perkembangan dunia pers saat ini.

Disayangkan, yang terjadi sekarang pada sebuah media adalah, media yang lebih ideologis umumnya muncul dengan konstruksi realitas yang bersifat pembelaan terhadap kelompok yang sealiran, dan penyerangan terhadap kelompok yang berbeda haluan. Oleh karena itu untuk menyeimbangkan jurnalisme Islam dengan jurnalis Barat, tidak berlebihan jika penulis menawarkan konsep yang ada di dalam al-Quran surat al-'Imran ayat 103 (*dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai...*).

Ajaran Islam itu tidak hanya sekedar ditulis di atas kertas, akan tetapi ajaran Islam itu dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Apapun profesi kita, prinsip-prinsip ajaran Islam wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Makanya antara jurnalistik secara umum dengan jurnalistik Islam ada segi perbedaan, tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, akan tetapi bagaimana informasi dapat merubah manusia ke arah yang lebih baik, adil dan manusiawi.

D. Etika Wartawan dalam Hukum Islam

Dalam praktik jurnalistik, wartawan Muslim hendaknya mengamalkan nilai-nilai dan akhlak Islam di dalam melaksanakan tugasnya, untuk ini bagi wartawan Indonesia ada Kode Etik Jurnalistik.

Pengawasan pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh Dewan Pers dan Dewan Kehormatan PWI. Dalam Dewan Kehormatan pernah duduk tokoh-tokoh Islam terkemuka antaranya Mohammad Natsir, H. Agus Salim, Muhyiddin Hamidy.

Wartawan senior, Achmad Istiqom, mengatakan, Kode Etik Jurnalistik wartawan Indonesia ini sangat Islami, berisi pedoman tingkah laku termasuk wartawan menulis berita harus dimulai dengan niat yang baik, pedoman kerja, pedoman penulisan berita / penyajian berita, cek dan ricek, obyektif, berita berdasarkan fakta, seimbang, tak boleh fitnah, pemakaian bahasa yang baik dan benar.

Secara umum *kode etik bermakna* suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu.

Di manapun kita hidup, bekerja, dan berada tentu ada kode etiknya, ada etikanya, ada aturannya atau akhlaknya. Antara lain:

Pertama, Menyampaikan informasi dengan benar,

Wartawan Muslim tidak merekayasa atau memanipulasi fakta, atau mencampuradukan yang benar dengan yang salah.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”. (QS Al-Ahzab [33]: 70)

Kedua, Melaksanakan Tabayyun (meneliti fakta/cek-ricek).

Wartawan Muslim sebelum memberitakan suatu hal, ia mesti meneliti, mengadakan cek dan ricek (cek ulang) atau disebut dengan *tabayyun*.

Hal ini untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan baku berita yang akan ditulis. Maka, wartawan Muslim hendaknya mengecek dan meneliti kebenaran fakta di lapangan dengan informasi awal yang ia peroleh agar tidak terjadi berita bohong, menebar kebencian, menggunjing apalagi memfitnah orang atau instansi lain, apalagi sesama Muslim.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَذِمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (QS Al-Hujurat [49]: 6).

Ketiga, Menyampaikan berita dengan argumentasi yang jelas, baik dan benar.

Wartawan Muslim dalam menulis berita atau artikel dengan Bahasa dan makna yang baik, benar, serta argumentasi yang jelas dan baik pula. Karakter, pola pikir, kadar pemahaman pembaca, harus dipahami sehingga berita yang disusun akan mudah dibaca dan dicerna, penuh dengan kebijakan dan kebaikan.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah [manusia] kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah [3] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS An-Nahl [16]: 125).

Ketiga, melaksanakan kegiatan kewartawanan secara profesional, mahir dan produktif.

Sehingga karya-karya jurnalistiknya menjadi tabungan amal sholihnya, yang memberikan manfaat kepada seluas dan sebanyak mungkin orang dan kalangan.

Karena ia adalah wartawan, alias penulis berita, maka pekerjaan pokoknya adalah menulis berita setiap hari. Tiada hari tanpa menulis, produktif menulis, menulis yang baik, beramal yang baik, bahkan terbaik.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

قُلْ يَتَّقُوا أَعْمَلُوا عَلَى مَكَاتِبِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Katakanlah: “Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja [pula], maka kelak kamu akan mengetahui”. (QS Az-Zumar [39]: 39).

Keempat, Menulis berita secara adil, objektif, berimbang dan komprehensif berdasarkan fakta dan data, bukan nafsu dan kepentingan pribadi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan [kebenaran] karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Maidah [5]: 8).



BAB III

KEBEBASAN WARTAWAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

D. Historitas Hukum Kebebasan Wartawan Menurut Undang-undang

Perubahan-perubahan berarti tanpa ada pergesekan antara nilai-nilai lama dan nilai-nilai baru, yang kadangkala tereskalasi menjadi suatu masalah sosial dan hukum. Namun bagaimanapun juga, halangan dan masalah yang terjadi dalam proses perubahan biarlah tetap menjadi suatu bagian dari proses alamiah perjalanan suatu sistem bernegara menuju ke arah yang lebih baik.³⁰

Berbicara mengenai perubahan dalam dunia pers menjadi suatu hal yang pada saat ini berada dalam suatu persimpangan dan dikotomi. Apakah akan dianut kebebasan pers secara mumi sebagaimana di negara-negara industri atau barat, ataukah pers yang akan tetap berada dalam batasan hukum, yang dalam hal ini adalah batasan hukum pidana. Belum lama ini, kasus *Tempo* vs Tommy Winata telah mengguncang dunia pers Indonesia, dimana wartawan telah diputus bersalah oleh pengadilan karena pemberitaan yang dianggap mencemarkan nama baik seseorang.³¹ Fakta tersebut kemudian berujung pada pertanyaan, apakah pers dalam hal ini wartawan dapat dipidana ketika ia menjalankan profesinya? Ataukah seharusnya pers diberikan jaminan akan kebebasan secara utuh bebas dari hukum pidana ketika ia menjalankan profesinya?

³⁰ <https://hukum.tempo.co/read/1059485/kebebasan-pers-di-indonesia>

³¹ <https://jurnalis.wordpress.com/2003/03/11/kronologis-penyerbuan-tomy-winata-ke-tempo/>

Hal tersebut menjadi suatu kajian yang menarik untuk ditelaah, karena hal tersebut merupakan bagian dari "masalah" transformasi Indonesia menuju negara yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi hukum.

Kebebasan pers tidak terelakkan lagi merupakan suatu unsur penting dalam pembentukan suatu sistem bernegara yang demokratis, terbuka dan transparan. Pers sebagai media informasi merupakan pilar keempat demokrasi yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara.³² Oleh karena itu sudah seharusnya jika pers sebagai media informasi dan juga sering menjadi media koreksi, dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas dan transparansi dalam dunia pers, sehingga pemberitaan dapat dituangkan secara sebenar-benarnya tanpa ada rasa takut atau dibawah ancaman sebagaimana masa Orde Baru berkuasa (*self-censorship*).

Mengenai nilai-nilai kebebasan pers sendiri, hal tersebut telah diakomodir di dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, yaitu diatur dalam Pasal 28, Pasal 28 E Ayat (2) dan (3) serta Pasal 28 F. Oleh karena itu, jelas negara telah mengakui bahwa kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berpikir adalah merupakan bagian dari perwujudan negara yang demokratis dan berdasarkan atas hukum.

Namun demikian, perlu disadari bahwa insan pers tetaplah warga negara biasa yang tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini,

³² https://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_pers

bagaimanapun juga asas persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* tetap berlaku terhadap semua warga negara Indonesia termasuk para wartawan, yang notabene adalah insan pers. Asas persamaan di hadapan hukum tersebut juga diatur secara tegas dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, yaitu di dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 D Ayat (1). Dengan demikian para insan pers di Indonesia tidak dapat dikecualikan atau memiliki kekebalan (*immune*) sebagai subjek dari hukum pidana dan harus tetap tunduk terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana ("KUHP") yang berlaku di Indonesia.

Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti kebebasan pers telah dikekang oleh undang-undang. Justru, konsep berpikir yang harus dikembangkan adalah perangkat perundang-undangan tersebut dibuat dan diberlakukan dengan tujuan untuk membentuk pers yang seimbang, transparan dan profesional.

Bagaimanapun juga harus diakui bahwa pers di Indonesia belum seluruhnya telah menerapkan suatu kualitas pers yang profesional dan bertanggung jawab dalam membuat pemberitaan. Hal ini patut diwaspadai mengingat belum seluruh rakyat Indonesia memiliki pendidikan dan tingkat intelegensia yang memadai. Jika, pers dibiarkan berjalan tanpa kontrol dan tanggung jawab, maka hal tersebut dapat berpotensi menjadi media agitasi yang dapat mempengaruhi psikologis masyarakat yang belum terdidik, yang notabene lebih besar jumlahnya dibanding masyarakat yang telah terdidik. Oleh karena itu kebebasan pers perlu diberikan pembatasan-pembatasan,

paling tidak melalui rambu hukum. Sehingga pemberitaan yang dilakukan oleh pers, dapat menjadi pemberitaan pers yang bertanggung jawab.

Yang menjadi masalah adalah jika pemberitaan pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina seseorang atau institusi dan tidak mempunyai nilai berita (*news*), dan di dalam pemberitaan tersebut terdapat unsur kesengajaan (*opzet*) dan unsur kesalahan (*schuld*) yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Jadi yang perlu ditekankan disini adalah, pidana tetap harus diberlakukan terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penghinaan atau fitnah dengan menggunakan pemberitaan pers sebagai media. Sementara kebebasan pers untuk melakukan pemberitaan jika memang dilakukan secara bertanggung jawab dan profesional, meskipun ada kesalahan dalam fakta pemberitaan tetap tidak boleh dipidana.

Contohnya adalah, berita *Newsweek* tentang pelecehan Qur'an di Guantanamo yang ternyata merupakan kesalahan narasumber dan *Newsweek* meminta maaf atas kesalahan tersebut dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam pemberitaan.

UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers ("UU Pers) sendiri belum mengakomodir mengenai permasalahan tersebut. Di dalam UU Pers sendiri hanya diatur mengenai sanksi pidana berupa denda jika perusahaan pers melanggar norma susila dan asas praduga tidak bersalah serta masalah pengiklanan yang dilarang oleh undang-undang (Pasal 18 Ayat 2 UU Pers). Sementara itu, selebihnya UU Pers hanya mengatur mengenai hak jawab dan hak koreksi untuk pemberitaan yang dianggap bermasalah. Hal inilah yang

sebenarnya yang untuk sementara pihak dianggap mengandung ketidakseimbangan. Namun dalam hal ini pers tidak dapat dipersalahkan, karena yang salah adalah UU Pers yang tidak mengatur mengenai potensi-potensi masalah hukum yang rumit dan berat yang dapat timbul dalam pemberitaan pers.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa konsep kebebasan pers dalam mengeluarkan pendapat dan pikiran merupakan hal yang mutlak bagi proses demokratisasi suatu negara. Hanya saja, kebebasan tersebut bukanlah kebablasan yang mutlak dan tanpa batas. Untuk mencegah disalahgunakannya pers sebagai media penghinaan, fitnah, dan penghasutan diperlukan perangkat hukum lain, yang sebenarnya bertujuan bukan untuk mengekang kebebasan pers namun membuat pers Indonesia menjadi lebih profesional dan bertanggung jawab serta menghormati hukum dan hak asasi manusia.

Jika melihat dari sudut pandang rancangan undang-undang KUHP (RUU KUHP") yang baru saat ini, maka Pasal 511 sampai dengan Pasal 515 RUU KUHP telah mengakomodasi permasalahan penghinaan maupun fitnah yang dapat terjadi dalam pemberitaan Pers.

Untuk masalah penghinaan Pasal 511 Ayat (1) RUU KUHP telah mengatur secara jelas mengenai kriteria tindak pidana penghinaan, yaitu terlihat dari unsur-unsurnya sebagai berikut, yaitu setiap orang, dengan lisan, menghina menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum.

Sedangkan untuk tindak pidana yang dilakukan secara tertulis diatur dalam Pasal 511 Ayat (2) RUU KUHP, sebagai pemberat tindak pidana terhadap Pasal 511 Ayat (1) RUU KUHP. Pemberatan tersebut akan dikenakan apabila penghinaan tersebut memenuhi unsur-unsur: dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum. Dengan demikian jika tindak pidana penghinaan dilakukan melalui pemberitaan pers telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 511 Ayat (2) RUU KUHP. Akan tetapi dalam Pasal 511 Ayat (3) RUU KUHP diatur pula mengenai dasar pembeda untuk melakukan hal-hal yang diatur dalam Pasal 511 Ayat (1) dan (2) RUU KUHP, yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Untuk tindak pidana fitnah, hal tersebut diatur dalam Pasal 512 RUU KUHP. Tindak pidana fitnah itu sendiri merupakan pengembangan dari tindak pidana penghinaan baik yang diatur dalam Pasal 511 Ayat (1) maupun Ayat (2) RUU KUHP. Tindak pidana fitnah merupakan tindak pidana penghinaan yang ditambahkan unsur kesempatan bagi pelaku penghinaan untuk membuktikan kebenaran apa yang dituduhkannya, dan jika apa yang dituduhkan oleh si pelaku tersebut tidak terbukti, maka ia telah melakukan tindak pidana fitnah. Apabila tindak pidana fitnah itu dilakukan melalui media pemberitaan pers, maka tindak pidana fitnah tersebut akan memenuhi unsur Pasal 511 Ayat (2) RUU KUHP.³³

³³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12999/kebebasan-pers-dalam-perspektif-pidana-ditinjau-dari-ruu-kuhp>

Dengan demikian RUU KUHP sendiri di lain sisi juga cukup memberikan perlindungan bagi kebebasan pers, yaitu kesempatan bagi terdakwa pelaku penghinaan atau fitnah untuk membuktikan kebenaran mengenai apa yang dituduhkannya. Atau dalam hal penghinaan atau fitnah tersebut dilakukan melalui pemberitaan pers maka wartawan yang melakukan pemberitaan tersebut dapat diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran mengenai pemberitaannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 512 ayat (2) RUU KUHP, dimana diatur bahwa pembuktian kebenaran akan tuduhan yang dilakukan tersebut, hanya dapat dilakukan dalam hal tertentu. *Pertama*, hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. *Kedua*, pegawai negeri dituduh melakukan suatu hal dalam melakukan tugas jabatannya.

Selanjutnya Pasal 513 Ayat (1) RUU KUHP memberikan dasar pemaaf bagi pelaku penghinaan dan fitnah yaitu apabila tuduhan yang dibuat oleh si pelaku tersebut terbukti kebenarannya berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka si pelaku tidak dapat dipidana atas fitnah. Hal ini tentu saja berlaku juga terhadap tindak pidana fitnah yang dilakukan melalui pemberitaan pers. Jika pemberitaan pers yang dianggap menghina atau menfitnah itu dapat dibuktikan kebenarannya maka, wartawan yang menjadi terdakwa tidak dapat dipidana atas tuduhan penghinaan atau fitnah. Sebaliknya, jika berdasarkan putusan hakim yang

telah berkekuatan hukum tetap perbuatan yang dituduhkan tersebut tidak terbukti, maka si terhina atau si terfitnah tersebut dibebaskan dari apa yang dituduhkan, dan putusan tersebut menjadi bukti sempurna bahwa apa yang dituduhkan tersebut tidak benar. Dalam hal ini benar-benar diperlukan hakim atau pengadilan yang betul-betul menghayati dan memahami seluk-beluk penerapan hukum pidana khususnya tentang penghinaan dan fitnah.

Dalam hal terjadi kasus penghinaan atau fitnah, maka proses persidangan terdakwa penghinaan atau fitnah akan ditunda terlebih dahulu jika hakim memutuskan untuk membuktikan kebenaran akan apa yang dituduhkan dalam penghinaan atau fitnah tersebut (Pasal 513 Ayat 3 RUU KUHP) yang dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis (termasuk media pemberitaan pers). Setelah persidangan masalah pembuktian kebenaran tuduhan tersebut mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka barulah proses persidangan perkara penghinaan atau fitnah dilanjutkan. Hal tersebut dilakukan karena pembuktian akan kebenaran tentang hal yang dituduhkan dalam penghinaan atau fitnah tersebut akan menjadi alat bukti yang sangat menentukan dalam persidangan perkara penghinaan atau fitnah.

Perlu ditekankan juga bahwa tindak pidana penghinaan dan fitnah adalah merupakan delik aduan (Pasal 518 RUU KUHP) karena pelaku tindak pidana penghinaan dan fitnah tidak akan dituntut, jika tidak ada pengaduan dari orang yang berhak mengadu, kecuali jika yang dihina atau difitnah adalah seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah (Pasal 515 RUU KUHP).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dimengerti bahwa kebebasan pers dalam mengemukakan berita tetap dijaga, akan tetapi bukan berarti kriminalisasi dalam pers tidak dimungkinkan. Dalam hal media pers telah menjadi alat untuk melakukan penghinaan dan fitnah tentu saja oknum tersebut harus dapat dipidana. Jadi bukan pers sebagai media pemberitaan yang dikriminalisasi tetapi pelaku, oknum yang mungkin saja menunggangi pers atau memanfaatkan pers untuk kepentingan yang melanggar hukum itulah yang akan dikriminalisasi. Jadi yang diadili adalah si pelaku dan bukan pers.

Dalam pembuktian pidana penghinaan dan fitnah yang dilakukan melalui media pemberitaan pers, tentu saja harus terdapat *opzet* atau kesengajaan pelaku untuk melakukan tindak pidana, dan juga adanya *schuld* atau kesalahan dalam perbuatan tersebut. Jadi sesungguhnya bukan pemberitaan pers yang dipidanakan, tetapi perbuatan menghina atau memfitnah tersebut yang dipidana.

Harus diakui bahwa belum semua pers Indonesia dikelola secara profesional dan mampu melakukan pemberitaan yang bertanggung jawab. Banyak perusahaan pers yang mengeluarkan berita-berita gosip dan pernyataan-pernyataan yang tidak benar atau bias. Dilihat dari sisi lain kepentingan masyarakat, tentu saja pers yang tidak berkualitas akan sangat merugikan karena tidak mendidik masyarakat dan sebagai pembentuk opini publik. Pers akan sangat berbahaya jika dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang memiliki tujuan-tujuan yang melanggar hukum.

Oleh karena itu jika dipandang dari sudut pandang hukum pidana khususnya dalam RUU KUHP, hukum secara seimbang telah mengatur antara kebebasan pers dan pertanggung jawaban isi dari beritanya. Dan perlu diingat bahwa pasal-pasal penghinaan dan fitnah dalam RUU KUHP adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan dan fitnah secara umum (general) jadi tidak hanya mengacu pada pemberitaan pers saja. Justru dengan adanya pasal-pasal mengenai penghinaan dan fitnah dalam RUU KUHP, maka pers Indonesia didorong untuk menjadi lebih profesional dan lebih bertanggung jawab dalam menerbitkan pemberitaan. Hal tersebut karena pers selain mempunyai tugas untuk memberikan informasi secara terbuka dan transparan terhadap masyarakat, juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat dan untuk menjaga opini publik, yang rentan terhadap situasi sosial politik di negara seperti Indonesia.

Akan tetapi ada yang perlu dikritisi dalam pasal-pasal mengenai penghinaan dan fitnah RUU KUHP yaitu mengenai pembuktian akan kebenaran tuduhan yang dibuat oleh terdakwa penghinaan atau fitnah yang didasarkan atas kepentingan umum atau pembelaan diri. Berdasarkan Pasal 512 Ayat (2) RUU KUHP, pembuktian kebenaran tuduhan yang dibuat oleh terdakwa penghinaan atau fitnah sepenuhnya tergantung pada keputusan hakim, sedangkan seharusnya pembuktian mengenai apa yang dituduhkan sebagai penghinaan atau fitnah harus dilakukan tanpa kecuali karena hal tersebut merupakan bukti apakah si terdakwa benar melakukan tindak pidana atau tidak.

Hal lain yang perlu dikritisi adalah tidak efisiennya persidangan karena sidang pembuktian akan kebenaran tuduhan fitnah atau penghinaan pasti akan memakan waktu yang lama sehingga asas peradilan yang cepat, dan biaya murah sulit untuk diterapkan dalam kasus penghinaan dan fitnah.

Sebagai penutup, kebebasan pers merupakan hal yang mutlak untuk dijaga dan dijamin secara hukum. Namun demikian pers sebagai bagian dari demokrasi harus memiliki profesionalisme dan tanggung jawab dalam melakukan tugasnya. Oleh karena itu hukum berada ditengah masyarakat guna untuk menciptakan keseimbangan antara demokrasi, kebebasan, dan tanggung jawab. Pers tidak kebal hukum tetapi kebebasan pers tidak pernah terancam karena kebebasan pers bukan merupakan kejahatan.

E. Dasar terbentuknya Hukum Kebebasan Wartawan dalam Undang-undang

Istilah pers berasal dari kata persen bahasa Belanda atau press bahasa Inggris, yang berarti menekan yang merujuk pada mesin cetak kuno yang harus ditekan dengan keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata pers berarti alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar, alat untuk menjepit atau memadatkan, surat kabar dan majalah yang berisi berita, orang yang bekerja di bidang persurat kabaran. Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara,

gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, disebutkan dalam pasal 3 fungsi pers adalah sebagai berikut :³⁴

a. Sebagai Media Informasi, ialah pers itu memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi kepada masyarakat, dan masyarakat membeli surat kabar karena memerlukan informasi.

b. Fungsi Pendidikan, ialah pers itu sebagai sarana pendidikan massa pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya.

c. Fungsi Menghibur, ialah pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat dan artikel-artikel yang berbobot. Berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, dan karikatur.

d. Fungsi Kontrol Sosial, terkandung makna demokratis yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- Social participation yaitu keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan.
- Social responsibility yaitu pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat.
- Social support yaitu dukungan rakyat terhadap pemerintah.

³⁴ Anwar Nasution, 1997, Tuntutan Profesionalisme Pers dalam Pemberdayaan

- e. Social Control yaitu kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah.
- f. Sebagai Lembaga Ekonomi, yaitu pers adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang pers dapat memanfaatkan keadaan disekitarnya sebagai nilai jual sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil produksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri. Menurut pasal 6 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, perana pers adalah sebagai berikut :
 - Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
 - Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
 - Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
 - Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
 - Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Penjajah Belanda sangat mengetahui pengaruh surat kabar terhadap masyarakat indonesia, karena itu mereka memandang perlu membuat UU untuk membendung pengaruh pers Indonesia karena merupakan momok yang harus diperangi.³⁵ Menurut Suruhum pemerintah mengeluarkan selain KUHP tetapi belanda mengeluarkan aturan yang bernama Persbreidel Ordonantie,

³⁵ Hestu Cipto Handoyo, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia, Atmajaya, Yogyakarta

yang memberikan hak kepada pemerintah Hindia Belanda untuk menghentikan penerbitan surat kabar atau majalah Indonesia yang dianggap berbahaya. Kemudian Belanda juga mengeluarkan Peraturan yang bernama Haatzai Artekelen, yaitu berisi pasal-pasal yang mengancam hukuman terhadap siapapun yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, serta penghinaan terhadap pemerintah Nederland dan Hindia Belanda, serta terhadap sesuatu atau sejumlah kelompok penduduk Hindia Belanda. Demikian halnya pada pendudukan Jepang yang totaliter dan pasistis, dimana orang-orang surat kabar pers Indonesia banyak yang berjuang tidak dengan ketajaman penanya melainkan dengan jalan lain seperti organisasi keagamaan, pendidikan, politik. Hal ini menunjukkan bahwa di masa Jepang pers Indonesia tertekan. Walaupun pers tertekan di masa Jepang namun ada beberapa keuntungan antara lain Pengalaman yang diperoleh para karyawan pers Indonesia bertambah. Terutama dalam penggunaan alat cetak yang canggih ketimbang Zaman Belanda. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pemberitaan makin sering dan luas. Adanya pengajaran untuk rakyat agar berpikir kritis terhadap berita yang disajikan oleh sumber-sumber resmi Jepang. Pers di masa demokrasi liberal landasan kemerdekaan pers adalah konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950, yaitu Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Isi pasal ini kemudian dicantumkan dalam UUD Sementara 1950. Walaupun pembatasan pers adalah efek samping dari keluhan wartawan terhadap pers Belanda dan Cina, namun pemerintah tidak membatasi pembredelan pers asing saja tetapi

terhadap pers nasional. Pers di masa demokrasi terdapat tindakan tekanan terhadap pers terus berlangsung yaitu pembredelan terhadap harian Surat Kabar Republik, Pedoman, Berita Indonesia dan Sin Po di Jakarta. Upaya untuk pembatasan kebebasan pers tercermin dari pidato Menteri Muda penerangan RI yaitu Maladi yang menyatakan, Hak kebebasan individu disesuaikan dengan hak kolektif seluruh bangsa dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Hak berpikir, menyatakan pendapat, dan memperoleh penghasilan sebagaimana yang dijamin UUD 1945 harus ada batasnya yaitu keamanan negara, kepentingan bangsa, moral dan kepribadian Indonesia, serta tanggung jawab kepada Tuhan YME. Pada awal kepemimpinan orde baru menyatakan bahwa membuang jauh praktik demokrasi terdapat diganti dengan demokrasi Pancasila, hal ini mendapat sambutan positif dari semua tokoh dan kalangan, sehingga lahirlah istilah pers Pancasila. Menurut sidang pleno ke 25 Dewan Pers bahwa Pers Pancasila adalah pers Indonesia dalam arti pers yang orientasi, sikap, dan tingkah lakunya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hakikat pers Pancasila adalah pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat, dan kontrol sosial yang konstruktif. Masa kebebasan ini berlangsung selama delapan tahun disebabkan terjadinya peristiwa Malari sehingga pers kembali seperti zaman orde lama. Dengan peristiwa Malari beberapa surat kabar dilarang terbit termasuk Kompas. Pers pasca peristiwa Malari cenderung pers yang mewakili kepentingan penguasa, pemerintah atau negara. Pers tidak

pernah melakukan kontrol sosial disaat itu. ³⁶Pemerintah orde baru menganggap bahwa pers adalah institusi politik yang harus diatur dan dikontrol sebagaimana organisasi masa dan partai politik. Kalngan pers kembali bernafas lega karena pmerintah mengeluarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi manusia dan UU no. 40 tahun 1999 tentang pers. Dalam UU Pers tersebut dengan tegas dijamin adanya kemerdekaan pers sebagai Hak azasi warga negara dan terhadap persnasioal tidak lagi diadakan penyensoran, pembreidelan, dan pelarangan penyiaran. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan memiliki hak tolak agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi, kecuali hak tolak gugur apabila demimkepentingan dan ketertiban umum, keselamatan negara yang dinyatakan oleh pengadilan. A. Landasan Hukum Pers Indonesia 1. Pasal 28 UUD 1945, berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. 2. Pasal 28 F UUD 1945, berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 3. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 20 dan 21 yang

³⁶ Wikrama Iryans Abidin, 2005, Politik Hukum Pers Indonesia, Gramedia

bebunyi : -Pasal 20 : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi di lingkungan sosialnya. -Pasal 21 : Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 4. UU N0. 39 tahun 2000 pasal 14 ayat 1 dan 2 : -Ayat 1 yaitu Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi di lingkungan sosialnya. -Ayat 2 yaitu Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 5. UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers pasal 2 dan pasal 4 ayat 1 : -Pasal 2 berbunyi Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. -pasal 4 ayat 1 berbunyi Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warganegara. B. Dewan Pers Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang pers pada pasal 15 ayat 1 menyatakan Dewan Pers yang independen dibentuk dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Melaksanakan pengkajian untuk pengembangan pers. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers

dalam menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Mendata perusahaan pers. Landasan Pers Nasional, Landasan idiil adalah Falsafah Pancasila Landasan Konstitusi adalah UUD 1945, Landasan Yuridis adalah UU Pokok Pers yaitu UU No. 40 tahun 1999.³⁷ Landasan Profesional adalah Kode Etik Jurnalistik, Landasan Etis adalah tata nilai yang berlaku di masyarakat. Distorsi peraturan perundang-undangan, contoh dalam UUD 1945 pasal 28 sudah sangat jelas menjamin kebebasan pers, tidak ada sensor, tidak ada breidel, setiap warganegara dapat melakukan perusahaan pers UU No. 11 tahun 1966. Namun muncul UU No. 21 tahun 1982 tentang pokok pers. Di dalamnya mengatur tentang Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers serta menteri penerangan dapat membatalkan SIUPP walaupun tidak menggunakan istilah breidel. Perilaku Aparat, yaitu perilaku aparat dengan cara menelpon redaktur, mengirimkan teguran tertulis ke redaksi media massa, membreidel surat kabar dan majalah, kekerasan fisik pada wartawan, menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh wartawan. Pengadilan Massa, Ketidakpuasan atau merasa dirugikan atas suatu berita dapat menimbulkan pengadilan massa dengan menghukum menurut caranya sendiri, menteror, penculikan, pengrusakan kantor media massa, dll. Perilaku pers sendiri, perolehan laba menjadi lebih utama daripada penyajian berita yang berkualitas dan memenuhi standar etika jurnalistik, karena iming-iming keuntungan yang lebih besar. Teori pers otoritarian : Teori ini menganggap Negara sebagai ekspresi tertinggi dari pada

³⁷ Zaenuddin HM, 2007, The Journalist, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta

kelompok manusia, yang mengungguli masyarakat dan individu. Negara adalah hal yang sangat penting yang dapat membuat manusia menjadi manusia seutuhnya anpa Negara manusia menjadi primitif tidak mencapai tujuan hidupnya. Oleh karena itu pers adalah alat penguasa untuk menyampaikan keinginannya kepada rakyat. Teori Pers Libertarian : Teori menganggap bahwa pers merupakan sarana penyalur hati nurani rakyat untuk mengawasi dan menentukan sikap terhadap kebijakan pemerintah. Pers berhadapan dengan pemerintah Pers bukanlah alat kekuasaan pemerintah. Teori ini menganggap sensor sebagai hal yang Inkonstitusional. Pers Tanggung Jawab Sosial, mengemukakan bahwa kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat, kebebasan pers perlu dibatasi oleh dasar moral, etika dan hati nurani insan pers sebab kemerdekaan pers itu harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Teori Pers komunis, menyatakan pers adalah alat pemerintah atau partai yang berkuasa dan bagian integral dari negara sehingga pers itu tunduk kepada negara. media dibawah kendali kelas pekerja karena pers melayani kelas tersebut. Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya

kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalisti.

F. Perlindungan Hukum Tentang Kebebasan Wartawan dalam Undang-Undang

Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa belanda berbunyi "*rechtsbesceherming van de burgers tegen de over heid*" dan dalam keputusan berbahasa inggris "*legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*".³⁸

Philipus Hadjon (1987 : 1-3) membedakan dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang

³⁸ <http://altajdidstain.blogspot.co.id/2011/02/perlindungan-hukum-bagi-wartawan-di.html>

definitive. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi, rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif; demikian juga halnya dengan peradilan administrasi Negara andaikata satu-satunya fungsi peradilan administrasi Negara adalah fungsi "peradilan" (*justitiele functie-judicial function*).

Dalam ilmu Hukum terdapat beberapa pengertian dari hukum yang dijadikan bahan rujukan yang konkret terhadap pengertian perlindungan hukum bagi wartawan, meliputi definisi hukum, sifat dan tujuan hukum pada umumnya. Menurut J.C.T. Simorangkir, SH Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi mengakibatkan timbulnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. (C.S.T. Kansil, 1986: 36)

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, bahwa : "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum". Yang dimaksud dengan "Perlindungan Hukum" adalah jaminan perlindungan dari

pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan profesinya sebagai seorang wartawan, perlu mendapat perlindungan hukum didalam menjalankan tugasnya mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.sebagaimana yang dimuat dalam pasal 8 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Perlindungan hukum yang dimaksud disini tak lain adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat yang diberikan kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Pers No. 40 tahun1999, secara eksplisit hanya dinyatakan dua organisasi pers. Pada pasal 1 ayat 5 berbunyi : Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Empat organisasi pers yang sampai sekarang masih menyelenggarakan pers adalah :

1. Organisasi wartawan seperti : Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),

2. Organisasi perusahaan pers seperti : Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS),
3. Organisasi grafika pers seperti : Serikat Grafika Pers (SGP),
4. Organisasi media periklanan seperti : Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI). Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai organisasi wartawan Indonesia yang tertua, didirikan tanggal 9 Februari 1946 di Kota Solo, Jawa Tengah dalam kongres pertamanya tanggal 9 – 10 Februari 1946, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 5 tahun 1985 ditetapkan hari jadi Persatuan Wartawan Indonesia tanggal 9 Februari 1946 sebagai Hari Pers Nasional.

Melihat pada kondisi jaman sekarang ini, dimana wartawan dikejar dan dibayangi oleh kegelisahan dan ketakutan dalam menjalankan tugasnya bahkan sering mendapat ancaman serta kekerasan fisik yang dialami oleh wartawan, yang dilakukan oleh masyarakat dan warga yang merasa dirugikan akibat pemberitaan yang ditulis oleh wartawan tersebut sehingga melakukan perhitungan diluar hukum (main hakim). Oleh sebab itu undang-undang nomor 40 tahun 1999 ini dibuat yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Dalam pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa adanya hak jawab dan hak koreksi yang dapat dijadikan langkah bagi masyarakat atau warga yang dirugikan oleh pemberitaan dengan menggunakan hak jawab dan hak koreksi yakni hak untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan atas suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh wartawan. Maka dari itu dalam memberitakan peristiwa dan opini harus menghormati norma-norma agama

dan rasa kesusilaan masyarakat serta praduga tak bersalah, dan melayani hak jawab dan hak tolak sebagaimana yang terdapat didalam pasal 5 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) adalah merupakan wadah dari lembaga organisasi bagi wartawan –wartawan yang ada.sebenarnya ada 4 organisasi wartawan yang ada, namun karena PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) lebih eksis dan banyak dikenal oleh masyarakat. Pemberian perlindungan hukum bagi wartawan adalah salah satu wujud dari hak asasi manusia untuk mendapatkan perlindungan hukum. Peran PWI selain memberikan bantuan hukum kepada anggotanya dalam menjalankan profesi kewartawanannya, juga membantu perselisihan dengan manajemen media massa dimana tempatnya bekerja. Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Ketua Tim Pembelaan Wartawan yakni diantaranya :

1. Melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada wartawan dalam kasus delik pers, baik pada tahap penyidikan maupun pada tahap persidangan di tingkat pengadilan negeri sampai dengan kasasi dan grasi,
2. Mewakili PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dalam menyelesaikan perselisihan antara wartawan dengan manajemen media tempatnya bekerja, termasuk pemberian bantuan hukum,
3. Mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang menghambat tugas-tugas jurnalistik,
4. Membentuk kelompok kerja bantuan hukum yang bersifat permanen atau sementara dan mengusulkan pengangkatannya kepada ketua umum,

5. Melaksanakan hal-hal lain yang dilimpahkan oleh ketua umum kepadanya.

Dari hal diatas menunjukkan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa kemerdekaan pers yakni sebagai wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999). Dalam hal ini wartawan yang menjalankan profesinya perlu mendapat perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, jadi wujud pelaksanaan perlindungan hukum bagi wartawan oleh Perusahaan Media Cetak adalah dengan adanya pemberian bantuan hukum yakni pengacara untuk mendampingi wartawan yang terkena kasus baik itu mendampingi pada saat di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Namun selain memberikan perlindungan hukum bagi wartawannya, ada sanksi terhadap wartawan yang memuat berita tidak sesuai serta dianggap melanggar kode etik jurnalistik.

BAB IV

ANALISIS KEBEBASAN WARTAWAN MENURUT UU PERS DALAM HUKUM ISLAM

C. Kebebasan Wartawan Di Indonesia Menurut UU No 40 Tahun 1999

Menurut penjelasan daripada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers Pasal 1 angka 1 bahwa pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Metamorfosa terhadap lahirnya Undang-Undang pers ini tidak terlepas dari sikap dan kebijakan rezim pemerintah yang dilewati dan dialami oleh pers itu sendiri. Seperti kebijakan mengenai pers pada era rezim orde lama atau pemerintahan Presiden Soekarno. Pada saat itu, kebijakan pemerintah selain menata solidaritas kebangsaan, juga memberikan janji manis kepada pers. Pada bulan Oktober 1945, melalui Menteri Penerangan, Amir Sjarifoedin, pemerintah mengeluarkan pernyataan penting mengenai pers, yaitu:

- a. Pikiran masyarakat umum itulah sendi dasar pemerintahan berkedaulatan rakyat.
- b. Pers yang tidak merdeka, tidak mungkin mengajarkan pikiran masyarakat hanya pikiran dari beberapa orang yang berkuasa saja. Maka asas kami (pemerintah) ialah pers harus merdeka.

Namun seiring berjalannya pemerintahan, wartawan yang kala itu kerap kali mengkritik kinerja pemerintah, akhirnya banyak menemui kejanggalan terhadap “tingkah” dari pemerintah. Karena kecaman-kecaman yang dilontarkan oleh pers, lama kelamaan pemerintah pun mulai “gerah” dengan kritikan tersebut. Pers dan pemerintah yang semula seiring sejalan pun mulai mengambil jarak hingga pemerintah yang sudah menganggap pers bak duri yang mengganggu jalannya ketenangan pemerintah pun mengambil tindakan keras dengan memusuhi pers.

Pada masa Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto telah dilahirkan sebuah Undang-Undang yang dipercaya menjembatani terhadap kemerdekaan pers. Yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Undang-undang ini secara umum memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers. Misalnya terhadap pers tidak dikenakan sensor dan pembredelan. Dalam Pasal 3 undang-undang yang dimuat secara singkat ini dengan jelas menyebut, pers nasional mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi. Sedangkan Pasal 4 undang-undang ini dengan tegas menyebut “ *terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor dan pembredelan*”. Namun demikian, kemerdekaan yang diberikan oleh undang-undang pun perlahan memudar. Pola yang dilakukan sama dengan rezim sebelumnya. Yaitu ketika pemerintah mulai terusik dengan kritik-kritik pers, maka saat itu pulalah hubungan antara pers dan pemerintah pun memanas. Hingga pemerintah tak sungkan untuk menekan, menangkap, dan memenjarakan wartawan.

Perubahan sikap terhadap pers itu dimungkinkan karena terdapat celah yaitu di dalam satu ayat dalam satu pasal. Ketentuan itu terdapat dalam Bab IX tentang peralihan, yakni dalam Pasal 20 ayat 1 yang pada intinya bahwa kepada pers diharuskan mendapatkan Surat Izin Terbit (SIT) dan ketentuan mengenai SIT tersebut diatur oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers. Peraturan peralihan ini memungkinkan pemerintah berhak pers mana yang boleh terbit dan yang tidak. Meskipun Dewan Pers disebut dalam pasal tersebut, namun saat itu Dewan Pers “dikebiri” sedemikian rupa oleh pemerintah. Pasal peralihan ini pun berakhir dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Namun Undang-Undang ini sangat berlainan dengan undang-undang sebelumnya dan semakin memperkuat belenggu kemerdekaan pers yaitu dengan mewajibkan seluruh pers agar memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Ketentuan mengenai SIUPP ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) No 01/Per/Menpen//1984 dan Surat Menteri Penerangan (SK Mepen) No 214A/Kep/Mepen/1984.[2] Untuk memperoleh SIUPP sangat sulit. Untuk merubah nama, jumlah halaman, dan ukuran penerbitan harus memperoleh izin khusus dari Menteri Penerangan. Pelanggaran seperti itu pun dapat mengakibatkan dicabutnya SIUPP sebagai kata lain yaitu diberangus.

Seiring dengan runtuhnya tampuk kepemimpinan Soeharto yang berarti mulai memasuki era reformasi, maka saat itu pers pun memanfaatkan momen

itu untuk terlepas dari belenggu Orde Baru. Saat Indonesia dipimpin oleh BJ Habibie, lahirlah Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang menjanjikan kemerdekaan untuk pers. Hal itu tersirat dari Pasal 4, yang berbunyi:

- a. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara.
- b. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelanggaran penyiaran.
- c. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi;
- d. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Kebebasan berbicara memiliki dimensi politik, bahwa kebebasan ini dianggap sebagai elemen esensial bagi keikutsertaan warga dalam kehidupan politik dan juga mendorong gagasan kritis dan perdebatan tentang kehidupan politik bahkan sampai soal kemenangan militer. Kaitan kebebasan berbicara dengan demokrasi kemudian diakui dalam hukum internasional hak asasi manusia yang menyatakan bahwa kebebasan berbicara merupakan pra-syarat bagi perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya sangat esensial bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan berbicara juga menjadi pintu bagi dinikmatinya kebebasan berkumpul, berserikat dan pelaksanaan hak untuk memilih.

Bila kita Mengikuti Perjalanan Pasal 28 UUD 1945 , secara tidak langsung kita telah mengikuti pasang dan surutnya yang sejalan dengan

kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Tidak ada salahnya bila kita sebagai warga Negara Indonesia mengikuti perjalanan Pasal 28 UUD 1945 tersebut serta dari mana sebenarnya bermula. Pasal 28 ini merupakan dari ide cemerlang Bung Hatta dengan Konsep aslinya berbunyi, " Hak rakyat untuk menyatakan perasaan dengan lisan dan tulisan, hak bersidang dan berkumpul, diakui oleh negara dan ditentukan dalam Undang-Undang.". Adapun Pasal 28 yang merupakan pasal asli UUD 1945 dan tetap dipertahankan, sebagai sebuah pasal dalam UUD setelah perubahan berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Dari rumusan tersebut yang berkaitan dengan kebebasan berbicara adalah bagian kalimat yang berbunyi, "mengeluarkan pikiran dengan lisan. Di dalam UUD 1945 dalam pasal 28E juga menerangkan seperti berikut " Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Namun berbicara mengenai Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Hal ini merupakan hak yang mahal harganya di Indonesia, banyak rambu-rambu hukum dan pengelompokan sosial yang membatasi kebebasan ini. Sistem pendidikan rasanya kurang menumbuhkan cara berpikir yang mendukung hak ini, sejak SD sampai Universitas. Hak ini sebenarnya perlu didukung oleh pendidikan, yang pada akhirnya akan membentuk pola pikir dan kepribadian yang bisa menghargai manusia dengan perbedaan-perbedaannya. Dalam sistem kenegaraanpun , kemerdekaan berbicara menjadi sebuah tiang penyangga pelaksanaan asas pemerintahan negara hukum

demokrasi. Dengan adanya kebebasan berbicara maka akan terjadi kompetisi pendapat dalam wacana publik tentang gagasan-gagasan yang diajukan yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat banyak. Oleh sebab itulah kebebasan berbicara ini kemudian meliputi pula kebebasan yang lain seperti kebebasan pers serta penyiaran. Kebebasan pers dan penyiaran dimaksudkan salah satunya adalah lebih kepada menjaga pluralisme pendapat dalam kehidupan bernegara khususnya politik yang menjadi prasyarat dasar bagi demokrasi.

Kebebasan berbicara merupakan hak asasi yang fundamental, yang tercermin sebagai bagian penting dan tidak terpisahkan dari nilai - nilai otonomi pribadi dan demokrasi. Ada hubungan langsung antara kebebasan berbicara dengan kebebasan untuk berpikir dan langkah penting dalam penyaluran ide dan gagasan oleh setiap individu. Kesempatan setiap individu untuk mengemukakan ide maupun gagasan mereka secara terbuka merupakan bentuk aktualisasi diri konkrit yang akan menempatkan mereka sebagai anggota masyarakat secara penuh dan bebas berbicara adalah ciri masyarakat demokratis.

Demokrasi sendiri tergantung pada orang-orang yang mampu membentuk masyarakat tempat mereka tinggal, dan untuk melakukan hal ini mereka perlu untuk mengbicarakan diri. Hak untuk kebebasan berbicara secara luas dilihat sebagai hak asasi manusia. Kebebasan dalam hal berbicara menjamin pertukaran pandangan dan pendapat yang diperlukan untuk menginformasikan ide maupun gagasan. Kebebasan berbicara, bagaimanapun, memerlukan platform publik.

Kebebasan berbicara hanya bisa menjadi pilar yang efektif bagi demokrasi dan hak asasi manusia jika dapat dilaksanakan secara terbuka. Jika informasi dan ide-ide dapat secara bebas dipertukarkan antara warga negara tanpa rasa takut. Untuk alasan ini, media secara luas diakui sebagai elemen penting dari proses demokrasi karena merupakan alat transaksi informasi publik. Hari ini, apa yang kita kenal sebagai 'media' telah berkembang secara *offline* yakni cetak dan media penyiaran tradisional serta online yang berupa informasi digital yakni internet, media sosial dan berbagai platform digital lainnya.

Undang-undang yang telah diterapkan di Indonesia yang mengatur mengenai kebebasan berbicara itu harus dengan tegas mencantumkan adanya kebebasan berbicara baik secara lisan maupun tertulis. Dalam rangka penegakkannya, maka setiap orang berhak mengumpulkan bahanbahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikannya. Dibalik itu harus pula ada ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut.

Pondasi utama dalam menentukan batasan konsep dan cakupan jaminan hak atas kebebasan berbicara mengemuka di dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tahun 1948, yang menegaskan:

“....Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan

menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah...”

Merujuk pada batasan instrumentasi sebagaimana dipaparkan di atas, kebebasan berbicara setidaknya mencakup tiga jenis bicara, yaitu:

- a. kebebasan untuk mencari informasi;
- b. kebebasan untuk menerima informasi;
- c. kebebasan untuk memberi informasi termasuk di dalamnya menyatakan pendapat.

UUD 1945 hasil amandemen kedua, yang disahkan pada 18 Agustus 2000 setidaknya memuat tiga ketentuan yang secara khusus dan eksplisit memberikan jaminan perlindungan bagi kebebasan berbicara di Indonesia.

Ketiga pasal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Ketentuan	Jaminan HAM
Pasal 28	Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 28E (3)	Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28 F	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selain itu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat perlindungan terhadap hak atas kebebasan berbicara. Pasal 23 UU No. 39 tahun 1999 menyatakan:

- a. Setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- b. Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Indonesia juga telah mengesahkan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*the International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) memberikan jaminan tegas mengenai hak atas kebebasan berbicara dan berpendapat. Negara juga telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memberikan jaminan perlindungan bagi pelaksanaan hak atas kebebasan berbicara. Perundangan tersebut, antara lain:

- a. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; dan
- b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU Pers mengatur dan melindungi kegiatan jurnalistik. Pasal 4 UU No. 40 Tahun 1999 menyatakan secara tegas bahwa “*Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara*”. UU ini juga memberi jaminan bahwa “*terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran*”.

Selain itu, UU ini menjamin tiga kegiatan dalam lingkup kebebasan berbicara yaitu kegiatan *“mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi”*. UU ini juga menjamin hak tolak wartawan dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum. Sementara isu yang menarik terkait dengan UU Penyiaran ialah mengenai topic keberagaman media, yang menjadi isu yang sangat penting bagi kebebasan berbicara dalam hukum internasional. Isu ini mengemuka dan menjadi relevan oleh karena negara harus membuat cara untuk melindungi pengguna media termasuk kelompok minoritas agar dapat menerima gagasan dan informasi yang ada.

Dalam ruang lingkup kebebasan berbicara akan terjadi hambatan dalam berkomunikasi, Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai.

Secara garis besar, terdapat 4 (empat) jenis hambatan komunikasi yaitu hambatan personal, hambatan fisik, hambatan kultural atau budaya, serta hambatan lingkungan.

a. Hambatan personal

Hambatan personal merupakan hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan/komunikate. Hambatan personal dalam komunikasi meliputi sikap, emosi, *stereotyping*, prasangka, bias, dan lain-lain.

b. Hambatan kultural atau budaya

Komunikasi yang kita lakukan dengan orang yang memiliki kebudayaan dan latar belakang yang berbeda mengandung arti bahwa kita harus memahami perbedaan dalam hal nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap yang dipegang oleh orang lain. Hambatan kultural atau budaya mencakup bahasa, kepercayaan dan keyakinan. Hambatan bahasa terjadi ketika orang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama, atau tidak memiliki tingkat kemampuan berbahasa yang sama.

Hambatan juga dapat terjadi ketika kita menggunakan tingkat berbahasa yang tidak sesuai atau ketika kita menggunakan jargon atau bahasa “slang” atau “prokem” atau “alay” yang tidak dipahami oleh satu atau lebih orang yang diajak berkomunikasi.

Hal lain yang turut memberikan kontribusi terjadinya hambatan bahasa adalah situasi dimana percakapan terjadi dan bidang pengalaman ataupun kerangka referensi yang dimiliki oleh peserta komunikasi mengenai hal yang menjadi topik pembicaraan. (Baca : Komunikasi Antar Budaya)

c. Hambatan fisik


Beberapa gangguan fisik dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan fisik komunikasi mencakup panggilan telepon, jarak antar individu, dan radio. Hambatan fisik ini pada umumnya dapat diatasi.

d. Hambatan lingkungan

Tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia sebagai peserta komunikasi. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang turut mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat mengalami rintangan yang dipicu oleh faktor lingkungan yaitu latar belakang fisik atau situasi dimana komunikasi terjadi. Hambatan lingkungan ini mencakup tingkat aktifitas, tingkat kenyamanan, gangguan, serta waktu.

Berbagai hambatan komunikasi yang dapat menyebabkan ketidakefektifan komunikasi dapat kita atasi dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini :

a. Pengirim pesan/komunikator/*sender*




Komunikasi adalah suatu proses yang berlangsung dua arah dan diawali oleh pengirim pesan. Pengirim pesan hendaknya merumuskan informasi sedemikian rupa agar tujuan komunikasi tercapai. Pengirim pesan harus proaktif dalam membuat penerima/komunikat/komunikat/ *receiver* mengerti dan memahami pesan yang disampaikan. Seringkali, apa yang dikatakan tidak selalu sesuai dengan apa yang didengar. Untuk menghindarinya, hal-hal yang harus dilakukan adalah :

- a) Menyatakan satu ide atau gagasan dalam satu waktu.
- b) Menyatakan ide atau gagasan dengan singkat.
- c) Memberikan penjelasan ketika diperlukan.
- d) Melakukan pengulangan jika diperlukan.

- e) Menerima dan memberikan umpan balik.
- f) Melakukan pilihan kata, nada suara dan bahasa tubuh yang tepat.
- g) Mengembangkan sikap empati terhadap penerima/komunikan/ komunikate/*receiver* dalam mengatasi hambatan kultural atau budaya dalam komunikasi.

b. Pesan

Pesan merupakan informasi sederhana yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima. Pesan dapat berupa pesan verbal maupun pesan non verbal. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah, pengirim harus :

- 
- a) Menggunakan terminologi yang tepat.
 - b) Berbicara dengan jelas.
 - c) Waktu pengiriman pesan disesuaikan dengan kesiapan penerima pesan untuk mendengarkan atau menerima pesan.
 - d) Menggunakan volume suara yang sesuai.
 - e) Pesan yang disampaikan hendaknya bersifat inklusif dan informatif. Inklusif artinya bahwa pesan berisi segala sesuatu yang diperlukan oleh penerima pesan untuk memahami maksud pengirim. Informatif artinya pesan merupakan sesuatu yang ingin diketahui oleh penerima pesan.

c. Penerima/komunikasikan/komunikate/*receiver*

Penerima pesan membutuhkan informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk itu, penerima pesan harus memegang kendali atas seluruh proses komunikasi yang berlangsung. Agar penerima pesan memegang kendali, adalah penting bagi penerima pesan untuk yakin bahwa pengirim pesan memahami apa yang diinginkan oleh penerima pesan dan mengapa mereka menginginkannya.


Aktif mendengarkan adalah suatu proses yang digunakan oleh penerima pesan untuk memfasilitasi komunikasi dan meningkatkan penampilan. Dalam artian, penerima pesan aktif dalam proses komunikasi. Agar penerima pesan dapat mendengarkan dengan aktif, hal-hal yang perlu dilakukan oleh penerima pesan adalah :

- a) Fokus perhatian pada pesan yang disampaikan dengan memberikan momen prioritas. Jika memungkinkan melihat atau melakukan kontak mata kepada pengirim pesan.
- b) Mendengar dan melihat isi pesan tidak langsung atau non verbal sama baiknya ketika mendengarkan kata-kata. Perhatikan petunjuk non verbal yang menyajikan informasi berdasar pada apa yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan. Persepsi yang diberikan oleh penerima pesan terhadap pesan dan pengirim pesan dapat berbeda. Pilihan kata, nada suara, posisi tubuh,

gesture dan gerakan mata merefleksikan perasaan dibalik kata-kata yang diucapkan.

- c) Menjaga pikiran tetap terbuka dan hindari penilaian.
- d) Melakukan verifikasi terhadap apa yang didengar atau disampaikan. Jangan berasumsi bahwa persepsi yang diberikan terhadap pesan merupakan bentuk persetujuan dengan tujuan pengirim pesan. Berikan umpan balik yang tepat kepada pengirim pesan.

d. Umpan Balik Pesan



Penerima yang efektif memverifikasi pemahaman mereka terhadap pesan yang dikirim oleh pengirim pesan. Mereka menyadari kata-kata, nada suara, dan bahasa tubuh ketika mereka memberikan umpan balik. Berbagai bentuk umpan balik yang diberikan dapat berupa pengakuan, pengulangan, dan parafrase.

Kemudian, yang dimaksud dengan pengakuan adalah bahwa penerima pesan telah menerima dan memahami pesan yang disampaikan. Untuk pesan yang bersifat informatif yang rumit, pengakuan saja tidaklah cukup untuk memastikan dan memahami pesan yang disampaikan. Sedangkan, yang dimaksud dengan pengulangan adalah mengulang kembali kata-kata yang disampaikan oleh pengirim pesan.

Terakhir, yang dimaksud dengan parafrase adalah mengulang kata-kata yang disampaikan oleh penerima pesan sendiri kepada

pengirim pesan. Parafrase memungkinkan penerima pesan untuk melakukan verifikasi terhadap pemahaman pesan dan menunjukkan kepada pengirim pesan bahwa penerima pesan mendengarkan pesan dengan baik.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebebasan Wartawan Menurut UU No 40 Tahun 1999

Dalam al-Qur'an disebutkan beberapa macam atau bentuk kebebasan manusia diantaranya: Kebebasan Beragama Kebebasan beragama dapat diartikan sebagai hak untuk memeluk suatu kepercayaan dan melakukan suatu peribadatan dengan bebas tanpa diikuti kekhawatiran. Sebagaimana firman Allah SWT:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(Q.S. Al-Baqoroh : 256)³⁹

Ayat ini menerangkan bahwa jika Allah menghendaki atas seluruh manusia beriman kepada-Nya, maka akan terlaksana. Tetapi Dia tidak menghendaki yang demikian. Dia berkehendak melaksanakan sunnah-Nya di alam raya ini. Tidak ada yang mampu mengubah sunnah-Nya kecuali Allah

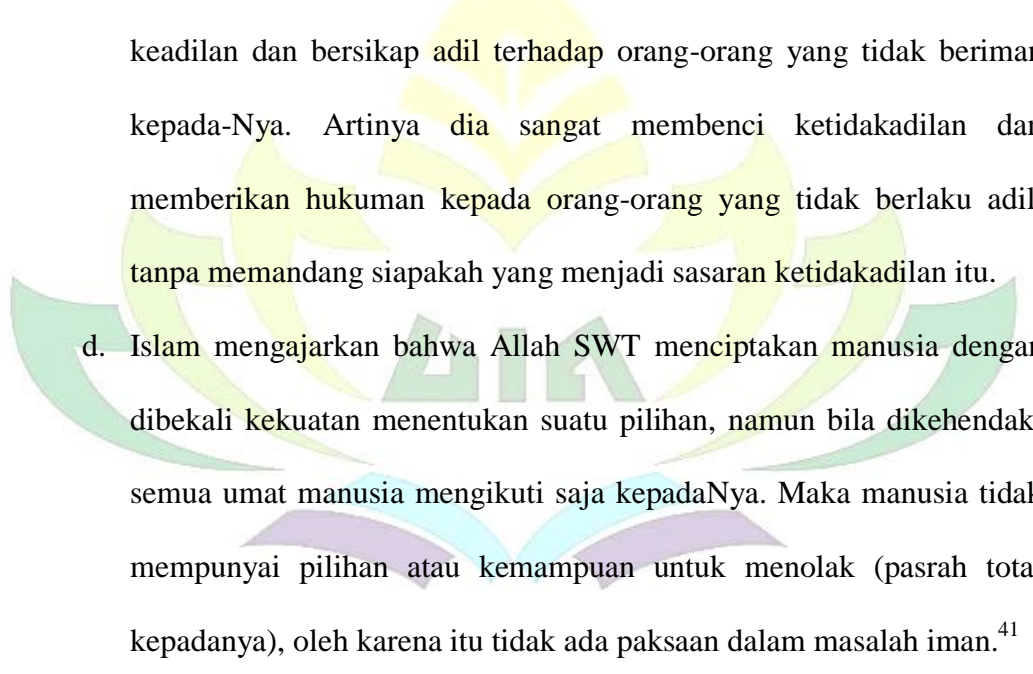
³⁹ Al Qur'an Surat Al-Baqoroh : 256, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, h. 198.

yang berkehendak. Diantara sunnah-Nya adalah memberi manusia akal, pikiran, dan perasaan yang membedakan manusia maupun makhluk satu dengan yang lainnya. Dengan akal pikiran dan perasaan tersebut, manusia menjadi makhluk yang berbudaya dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk, kemudian akan dihitung sesuai dengan apa yang telah diusahakannya.

Disamping itu, Allah mengutus seorang rasul untuk menyampaikan risalah kenabian, mengajak pada yang ma'ruf dan meninggalkan larangan. Manusia dengan akal dan pikirannya tersebut dapat menilai apa yang disampaikan oleh Rasul. Tidak ada paksaan bagi manusia untuk menentukan pilihan atas apa yang menjadi keinginannya.⁴⁰

Kepercayaan atau iman adalah persoalan pilihan batin seseorang yang tidak bisa di ganggu gugat. Kepercayaan merupakan suatu keputusan yang asasi bagi setiap manusia karena itu tidak diperkenankan seseorang memaksakan kepercayaannya yang diyakininya kepada orang lain dengan cara apapun. Andaikata seseorang diberi kebebasan memilih untuk tidak percaya pada risalah Allah SWT, ia sepenuhnya berhak melakukannya tanpa ada tekanan atas bujukan dari pihak lain. Semangat yang melekat pada Nabi Muhammad SAW dan generasi Islam pertama merupakan satu bentuk keyakinan dan ketulusan hati yang sangat teguh, yang selalu berakar yang berlandaskan pada filsafat Islam. Landasan filosofis Islam dapat diringkas menjadi empat prinsip antara lain:

⁴⁰ M. Quaish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, h. 161.

- 
- a. Islam mengakui keagungan manusia tanpa memandang credo, ras atau warna kulit.
 - b. Islam sangat menekankan bahwa yang berhak menghakimi atau memberikan hukuman kepada seseorang yang tidak beriman bukan tugas seorang muslim melainkan semata-mata adalah prerogatif Allah SWT.
 - c. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT Yang Maha Adil, menyukai keadilan dan bersikap adil terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada-Nya. Artinya dia sangat membenci ketidakadilan dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak berlaku adil, tanpa memandang siapakah yang menjadi sasaran ketidakadilan itu.
 - d. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan dibekali kekuatan menentukan suatu pilihan, namun bila dikehendaki semua umat manusia mengikuti saja kepadanya. Maka manusia tidak mempunyai pilihan atau kemampuan untuk menolak (pasrah total kepadanya), oleh karena itu tidak ada paksaan dalam masalah iman.⁴¹

Sumber petunjuk universal adalah kapasitas yang melekat pada seseorang untuk meyakini Tuhan. Ia berkaitan dengan penciptaan manusia sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab pribadi dan sebagian mengandung arti pilihan dan kehendak bebas. Al-Quran menyebutkan fitrah dalam pernyataan berikut: Ar-Rum 40

⁴¹ Ahmed. O. Altwajri, *Op. Cit*, h. 63-67.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ

ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

Artinya: Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. (Q.S. Ar-Rum : 40)⁴²

Al-Zamahsari sesuai dengan teori objektifisme rasionalis Mu'tazilah menafsirkan fitrah sebagai *khilqa* (watak alamiyah) dalam arti bahwa Tuhan telah menciptakan kapasitas pada manusia untuk mengakui ke Esaan Nya dan menerima Islam. penafsiran yang demikian menurutnya adalah falid atas dasar bahwa ada kemiripan antara fitrah dan akal dan kesesuaian dan fitrah dan pertimbangan logis. Dengan kata lain fitrah adalah pertimbangan obyektif dan universal dan seperti telah diketahui fitrah adalah kapasitas untuk menguji pilihan rasional berkenaan dengan keyakinan, tidak diragukan lagi bahwa fitrah merupakan watak yang di bawa sejak lahir dan kapasitas yang melekat yang memungkinkan seseorang untuk menerima atau menolak keyakinan.⁴³

Dalam arti demikian, keyakinan merupakan sesuatu yang dengan bebas merupakan urusan langsung antara Tuhan dengan manusia dan tidak dapat dipaksa. Pengakuan terhadap kebebasan beraqidah diberikan kepada manusia

⁴² Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 40, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, h. 405.

⁴³ avid Little, John Kelsey dan Abdul Aziz Sachedina, *Kajian Lintas Kultural Islam Barat: Kebebasan Agama dan Hak-Hak Azasi Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, h. 90.

semata-mata akibat kebebasan dan kesanggupannya mempertanggungjawabkan kebebasan tersebut.⁴⁴ Bentuk umum terhadap toleransi dan penghargaan Islam terhadap kebebasan beraqidah dan beragama tidak cukup hanya dengan memancangkannya keseluruh ufuk yang luas dan meninggi yang mencakup seluruh manusia, akan tetapi Islam dengan pengakuannya terhadap kebebasan beragama, mewajibkan kepada pemeluk-pemeluknya untuk memeluk agama, beraqidah dan berperangai tidak hanya sekedar toleransi bersikap baik maupun perdamaian belaka tapi juga harus bisa membentuk kepribadian baik yang disadari oleh nilai-nilai agama.

Oleh karena itu manusia diberi kebebasan dan kemerdekaan serta kepercayaan penuh untuk memilih jalannya masing-masing dan diberi kesadaran moral untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, sesuai dengan hati nuraninya atas bimbingan wahyu.⁴⁵

Al-Qur'an banyak membicarakan tentang kebebasan manusia untuk menentukan sendiri perbuatannya yang bersifat *ikhtiarriyah* yaitu perbuatan yang dapat dinisbatkan kepada manusia dan yang menjadi tanggung jawabnya, karena memang ia mempunyai kemampuan untuk melakukan atau meninggalkannya. Misalnya yang sering di sebut di dalam Al-Qur'an menerima dan menolak ayat-ayat yang di bawa Rasul. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Luqman ayat 21 -22, bahwa orang yang menolak untuk

⁴⁴ Aisyiah Bintu Syati, *Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an*, Alih Bahasa Ali Zawawi, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1999, h. 12.

⁴⁵ M. Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 32-33.

mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah SWT dan orang-orang yang menerimanya.⁴⁶

Kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat juga telah dijelaskan di dalam firman Allah SWT: Al-Baqoroh 260

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أُولَٰئِكَ ثُبُورٌ ۚ قَالَ بَلَىٰ
وَلَكِن لِّيَبْتَلِيَٰنِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ
كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :*Dan (Ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu ?" Ibrahim menjawab: "Aku Telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku) Allah berfirman: "(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. (Allah berfirman): "Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q. S. Albaqoroh : 260)⁴⁷*

Ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi *Afalaa ta'qiluun* dan *Afalaa tatafakkaruun* menunjukkan bahwa al-Qur'an menganjurkan kepada setiap orang untuk berfikir dan tentu saja membolehkan kebebasan berfikir, karena hasil pemikiran antar individu itu tidak sama, namun kebebasan berfikir dan berpendapat harus didasarkan pada tanggung jawab dan tidak

⁴⁶ Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, h. 20.

⁴⁷ Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 260, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, h. 78.

mengganggu kepentingan umum, serta tidak menciptakan permusuhan antar manusia. Menurut Ma'arif, bahwa Islam menjamin kebebasan berpendapat semua orang tanpa kecuali. Kebebasan ini terkait dengan masalah-masalah umum seperti moralitas, kepentingan dan hukum. Konsep *Al-Amr bi Al-Munkar wa Al-Nahyu an Al-Munkar* menunjukkan bahwa Islam mempunyai perhatian yang sangat dalam terhadap moralitas manusia dalam masyarakat. Membatasi kebebasan berpendapat seorang individu dibenarkan demi menjaga kehidupan masyarakat dari permusuhan yang disebabkan oleh kata-kata atau pembicaraan kotor.

Oleh karena kebebasan berfikir merupakan satu kebebasan yang ditentang kepada setiap manusia untuk memikirkan sebebas-bebasnya segala yang dapat dipecahkan secara ilmiah dan pada akhirnya mampu meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Pencipta Alam Semesta.

Di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ

دُونِهِ مِنْ وَاٍلِ

Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya;

*dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar-Ra'd: 11)*⁴⁸

Ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah tidak mencabut nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada sesuatu kaum, selama kaum itu tidak merubah ketaatan dan bersyukur kepada Allah.⁴⁹ Sehingga ini membuat sesuatu kaum bebas berkehendak untuk mencapai perubahan yang dilakukannya. Kebebasan berkehendak (*free will*) pada kenyataannya merupakan aspek substansial yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek kebebasan yang menyempurnakan manusia sesuai tuntutan kesanggupannya memikul amanat. Dan pada saat yang sama menetapkan adanya tanggungjawab manusia terhadap amal perbuatan baik dan buruk berupa pahala dan siksa.

Memahami masalah ini, para pemikir terpecah menjadi berbagai golongan. Golongan jabariah berpendapat, segala sesuatu terjadi atas kehendak mutlak Tuhan, manusia tidak memiliki andil sedikit pun tentang suatu urusan, berbagai urusan itu terjadi, semata-mata atas qodo' dan qodar. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatan itu, manusia berbuat baik dan buruk, patuh dan tidak patuh pada Allah SWT dan atas kehendak dan kemauannya sendiri. Pendapat yang sama mengatakan bahwa perbuatan manusia bukanlah diciptakan Tuhan pada diri manusia, tetapi manusia sendirilah yang mewujudkan perbuatannya.

⁴⁸ Al Qur'an Surat Ar-Ra'd Ayat 11, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, h. 108.

⁴⁹ Al-Jalalain, *Tafsir al-Jalalain*, al-Kutub al-Arabiyyah, Indonesia, t.th, h. 267.

Golongan ini mengakui adanya kehendak bebas manusia, hal ini didasarkan atas dalil Al-Qur'an ayat 62. Golongan lain adalah Al-Asy'ariah, dalam hal ini kaum asy'ariah lebih dekat pada paham jabariah dari pada paham mu'tazilah. Manusia dalam kelemahannya banyak bergantung pada kehendak dan kekuasaan Tuhan. Untuk menggambarkan hal tersebut Al-Asy'ari memahami kata *Al kasb* (perolehan).

Al kasb menurut Al-Asy'ari sendiri ialah bahwa sesuatu terjadi dengan perantara daya yang diciptakan dan dengan demikian menjadi perolehan bagi orang yang dengan dayanya perbuatan itu timbul. Argumen yang diajukan oleh Al-Asy'ari tentang penciptaan *kasb* oleh Tuhan adalah ayat Ash-Shaffat ayat 96:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu". (Q.S. As-Shaffaat : 96)*⁵⁰

Jadi dalam paham Al-Asy'ari perbuatan-perbuatan manusia adalah diciptakan Tuhan dan tidak ada pembuatan bagi *kasb* selain Allah SWT. Dalam teori *kasb* untuk mewujudkan suatu perbuatan manusia terdapat dua perbuatan yaitu perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan adalah hakiki dan perbuatan manusia adalah majasi (lambang). Dengan demikian perbuatan manusia pada hakekatnya terjadi dengan perantaraan

⁵⁰ Al Qur'an Surat Ash-Shaffat Ayat 96, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, h. 497.

daya Tuhan, tetapi manusia dalam pada itu tidak kehilangan sifat sebagai pembuat.⁵¹

Dari argumen-argumen diatas Hasan Al Basri nampaknya telah mengambil suatu independen atas jabar dan qodar, Hasan AL Basri berpendapat bahwa Tuhan tidak menciptakan semua perbuatan manusia. Dia menyuruh manusia hanya untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan keji atau munkar. Menurut petunjuk berasal dari Allah SWT tetapi perbuatan buruk datang dari manusia.⁵² Perbuatan yang baik merupakan anugerah dari Allah SWT, Allah-lah yang menentukan kualifikasi kebaikan dan kejujuran pada diri mahluknya. Dengan sikap tersebut di atas seseorang akan dicatat disisi Allah SWT sebagai orang yang baik dan berserah diri serta dijanjikan akan di masukkan surga, sebaliknya sikap buruk atau perbuatan keji mengakibatkan seseorang terjerumus ke dalam kesesatan dan kesesatan itu akan mengantarkannya ke neraka.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kejujuran dalam berbicara akan membawa kepada kebajikan, maka mensucikan akhlak manusia, berkata baik, memberi nasehat, mengajarkan ilmu yang bermanfaat merupakan perwujudan dari kejujuran. Sedangkan kejahatan atau dosa akan menjadikan manusia terjerumus kedalam kesesatan yang akan mengantarkannya ke neraka, atas dasar itulah muncul adanya tanggungjawab terhadap niat dan kehendaknya, maka niat dan kehendak

⁵¹ Budi Munawar, Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Paramadina, Jakarta, 1995, h. 140-141.

⁵² Madjid Khudari, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, h.

seseorang mempunyai peran yang sangat besar dalam nilai amal sekaligus dalam pertanggungjawabannya. Allah SWT hanya menunjukkan jalan yang seyogyanya diikuti manusia mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu manusia harus mengerjakan penyelamatan dirinya dan penyelamatan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang beriman dan beramal shaleh.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

1. Kebebasan wartawan yang diatur undang-undang yaitu Media massa cetak merupakan salah satu sarana dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyamaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Untuk itu peran wartawan sangat penting sekali dalam memenuhi hak masyarakat tersebut dan pada saat menjalankan pekerjaan atau profesinya tadi tentunya harus mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana tertuang dalam pasal 8 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Dimana para wartawan sangat membutuhkan sekali perlindungan hukum dari tempatnya bekerja agar pada saat bertugas tidak dikejar-kejar maupun dibayangi rasa takut terhadap ancaman, teror, maupun kekerasan. Bentuk dari upaya perlindungan hukum yang diberikan perusahaan media massa cetak kepada wartawannya adalah dengan adanya pemberian batuan hukum yakni pengacara untuk mendampingi wartawan yang terkena kasus baik itu mendampingi pada saat di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Namun selain memberikan perlindungan hukum bagi wartawan, ada sanksi terhadap wartawan yang memuat berita yang tidak sesuai serta dianggap melanggar kode etik jurnalistik.
2. Dalam perspektif hukum Islam tentang kebebasan wartawan dalam berbicara mengedepankan kejujuran dalam berbicara karena akan

membawa kepada kebajikan, maka mensucikan akhlak manusia, berkata baik, memberi nasehat, mengajarkan ilmu yang bermanfaat merupakan perwujudan dari kejujuran. Sedangkan kejahatan atau dosa akan menjadikan manusia terjerumus kedalam kesesatan yang akan mengantarkannya ke neraka, atas dasar itulah muncul adanya tanggungjawab terhadap niat dan kehendaknya, maka niat dan kehendak seseorang mempunyai peran yang sangat besar dalam nilai amal sekaligus dalam pertanggungjawabannya.

3. Saran

1. Perlunya pengawasan yang lebih ketat oleh pemerintah untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dalam kebebasan wartawan agar bebas berexpresi dalam mengemukakan pendapat.
2. Adanya jaminan oleh pemerintah dalam kebebasan wartawan untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tanpa di batasi oleh kebijakan-kebijakan politik yang tidak demokratis.
3. Terus dilakukan advokasi mengenai pentingnya menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap kebebasan wartawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004
- A.M. Hoeta Soehoet, *Dasar-Dasar Jurnalistik*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2010
- Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 260, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012
- Al Qur'an Surat Ar-Ra'd Ayat 11, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012
- Al-Jalalain, *Tasfsir al-Jalalain*, al-Kutub al-Arabiyyah, Indonesia, t.th
- Al Qur'an Surat Ash-Shaffat Ayat 96, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012
- Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 30, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012
- Aisyiah Bintu Syati, *Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an*, Alih Bahasa Ali Zawawi, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1999
- Avid Little, John Kelsey dan Abdul Aziz Sachedina, *Kajian Lintas Kultural Islam Barat: Kebebasan Agama dan Hak-Hak Azasi Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997
- Al Qur'an Surat Yunus Ayat 99, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012
- Ahmed. O. Altwajri, *Islam Barat dan Kebebasan Akademis*, Penerjemah Mujib, Musyafak Maimun, Titian Ilahi, Yogyakarta, 1997
- Basiliun Triharyanto, *Pers Perlawanan*, Yogyakarta: Lkis, 2009
- Budi Munawar, Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Paramadina, Jakarta, 1995

Cummings, Milto C. dan David Wise, 1985, *Democracy Under Pressure*,
Harcourt Brace Jovanovich Publishers

Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa* (Jakarta: Erlangga, 1991)

Don R.Pember and Clay Calvert, 2008, *Mass Media Law*, McGraw-Hill
Companies, Inc. New York

Faizal, *Penelitian Kualitatif : dasar-dasar dan aplikasi*, Malang: 1990

F.Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers Berbagai
Negara*, (Greapers: Jakarta 1990)

G. Setya Nugraha dan R. Maulina F, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karina

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980

Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan*, Al-Ma'arif,
Bandung, 1995

Harmin Hatta, *Tingkat Pengetahuan Pemahaman Kode Etik jurnalistik wartawan
kota Makassar*, (Grafindo : Jakarta 2010)

Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:
Bayumedia, 2006

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik
dan MK*. Konstitusi Press, Jakarta

Krisna Harahap.2003. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Bandung:
Grafiti. Kuntjoro

Kusmandi, dan Samsuri. *Undang-Undang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan
Pers*. (Jakarta: Dewan Pers. 2010)

Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Yogyakarta: UII Press, 2005

M. Quaish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002

M. Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996

Madjid Khudari, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya,
1999

Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007

Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Sirikit Syah, *Rambu Rambu Jurnalistik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984

Tim Penyusun, *UUD 1945*, Arloka, Surabaya, 2012

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

UNESCO, *Glosarium Toolkit Kebebasan Berekspresi bagi Aktivis Informasi tentang kebebasan berekspresi*

Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat Dimuka Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran

UNESCO, *Glosarium Toolkit Kebebasan Berekspresi bagi Aktivis Informasi tentang kebebasan berekspresi*

Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta 1989